



Indonesia Chapter #111



Building a better  
working world

# Survai Fraud Indonesia



2016

A light blue silhouette map of Indonesia is centered in the lower half of the page. The year '2016' is printed in a large, grey, sans-serif font over the map.





Indonesia Chapter #111

# Survai Fraud Indonesia 2016

Disponsori oleh:



**SURVAI FRAUD INDONESIA 2016**

Penerbitan Agustus 2017

ACFE INDONESIA CHAPTER

**SURVAI FRAUD INDONESIA 2016**

Jakarta: ACFE Indonesia Chapter, 2017

60 halaman

Hak cipta milik ACFE Indonesia Chapter

Diterbitkan oleh:

**ACFE INDONESIA CHAPTER**

Menara Taspen (d.h. Gedung Arthaloka) lantai 7 Suite 706

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Indonesia

Telp. 62 21 57933222, 62 21 57933295 Fax. 62 21 57933222

Email: [secretariat@acfe-indonesia.or.id](mailto:secretariat@acfe-indonesia.or.id)

Website: [www.acfe-indonesia.or.id](http://www.acfe-indonesia.or.id)

# Pengantar Presiden

**F**raud merupakan bahaya laten yang mengancam dunia. Hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Untuk mengetahui biaya, frekuensi kejadian, metodologi dan berbagai aspek dari *occupational fraud* (*fraud* yang berhubungan dengan pekerjaan) maka ACFE Global setiap 2 tahun sekali melakukan survei yang dituangkan ke dalam *Report To The Nation* (RTTN) yang menyajikan data statistik tentang hal-hal tersebut. Survei RTTN dilakukan terhadap anggota ACFE yang bersertifikat CFE di seluruh dunia, termasuk Indonesia.



ACFE Indonesia Chapter berpendapat bahwa hasil survei yang disajikan di dalam RTTN tidak sepenuhnya mewakili *fraud* yang terjadi di Indonesia. Karenanya, ACFE Indonesia Chapter bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya dan disponsori oleh Ernst and Young (EY) Indonesia menyusun Survei *Fraud* Indonesia (SFI) dengan berpedoman pada pola yang dilakukan oleh ACFE Global dalam RTTN-nya. Direncanakan SFI, seperti halnya RTTN, akan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Hasil dari SFI 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh *fraud* terhadap organisasi di Indonesia serta bagaimana mengenali pola perilaku dari pelaku maupun modus operandi yang digunakan dan menjadi dasar bagi penerapan kebijakan pengendalian *fraud*. Selain itu SFI 2016 diharapkan dapat memberikan *awareness* kepada organisasi atas terjadinya risiko *fraud* serta dapat memberikan kontribusi untuk penelitian lanjutan di bidang *fraud* dan digunakan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan internal.

Responden SFI tidak sepenuhnya memiliki karakteristik yang sama dengan responden RTTN, dimana responden RTTN sepenuhnya adalah anggota ACFE sedangkan responden SFI adalah para investigator dan pemerhati *fraud*, baik anggota maupun non anggota ACFE Indonesia Chapter. Walaupun demikian perbedaan tersebut ternyata tidak memberikan hasil yang berbeda jauh. Perbedaan yang mencolok adalah pada jenis *fraud* yang banyak terjadi di Indonesia berbeda dengan *fraud* yang banyak terjadi di negara-negara lain.

Laporan ini berisi hasil survai atas frekuensi, kerugian, serta durasi waktu terjadinya *fraud*, deteksi/temuan awal *fraud*, organisasi/lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud*, pendeteksian *fraud*, pelaku *fraud* dan penyelesaian tindak *fraud* dilengkapi dengan tabel terkait. Metodologi yang digunakan dalam survai ini adalah dengan menggunakan data primer berupa kuesioner online maupun tercetak selama periode Juni hingga September 2016. Data sekunder diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung periode tahun 2003 sampai dengan Mei tahun 2016.

Mengingat baru pertama kali dilaksanakan, tentunya survai ini masih banyak terdapat kekurangannya, baik dari pembuatan kuesioner, pengumpulan responden sampai ke metode pengolahan data dan elemen-elemen lain dari survai ini dan karenanya masukan pembaca dan pengguna survai ini merupakan hal yang kami sangat harapkan, untuk digunakan dalam perbaikan survai di masa yang akan datang. Sehingga hasil survai bisa digunakan secara lebih maksimal oleh para penggunanya.

Sesuai moto ACFE *Together Reducing Fraud Worldwide*, *Fraud* hanya dapat dikurangi apabila seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan swasta memiliki komitmen bersama dan bekerja sama. Kami mengharapkan SFI 2016 dapat menjadi salah satu kontribusi ACFE Indonesia Chapter dalam usaha mengurangi *fraud* tersebut.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada P3K2P STIE Perbanas Surabaya, EY Indonesia dan rekan-rekan investigator maupun pemerhati *fraud* yang telah menjadi responden SFI serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu terlaksananya SFI tahun 2016 atas terbitnya hasil survai.



Dr Gatot Trihargo, CFE

# Daftar Isi

<b>PENGANTAR PRESIDEN</b>	<b>05</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>07</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>08</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>10</b>
<b>INFORMASI <i>FRAUD</i></b>	<b>12</b>
Frekuensi, Kerugian, serta durasi waktu terjadinya <i>fraud</i>	13
Deteksi /Temuan Awal <i>Fraud</i>	17
Organisasi/lembaga yang Paling dirugikan oleh <i>Fraud</i>	27
Pendeteksian <i>Fraud</i>	30
Pelaku <i>Fraud</i>	31
Tanda-tanda Perilaku <i>Fraud</i>	46
Penyelesaian Tindak <i>Fraud</i>	47
<b>INFORMASI PELAKU KORUPSI INDONESIA 2016</b>	<b>48</b>
<b>DEMOGRAFI</b>	<b>54</b>
<b>METODOLOGI</b>	<b>60</b>
<b>TENTANG ACFE</b>	<b>62</b>

# Ringkasan Eksekutif

**A**ssociation of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter tahun 2016 bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya melakukan penelitian tentang *fraud* yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini disebut Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang mendasarkan pada *Report to The Nations* (RTTN) yang merupakan laporan dua tahunan tentang *fraud* yang dibuat oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE).

Tujuan dilaksanakannya SFI di tahun 2016 ini adalah (1) untuk mendapatkan gambaran tentang *fraud* yang terjadi Indonesia, (2) menjadi dasar bagi ACFE Indonesia Chapter untuk memberikan saran dan pendapat kepada para pemegang kebijakan di Indonesia, khususnya pemerintah dan swasta untuk memberantas *fraud* di Indonesia, serta (3) sebagai sarana bagi para peneliti untuk mengembangkan penerapan kebijakan anti *fraud* di Indonesia. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak atau instansi-instansi pemerintah, swasta maupun dunia pendidikan.

Berikut ringkasan atas hasil survei *fraud* di Indonesia. Survei ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh para pemegang sertifikat CFE maupun praktisi yang berpengalaman dalam pemeriksaan atau investigatif *fraud* serta didasarkan pada persepsi tentang *fraud* di Indonesia atas jawaban-jawaban kuesioner.

Responden menyatakan *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Responden juga menyatakan bahwa kerugian terbesar ada pada tindak



pidana korupsi dengan kerugian setiap tindakan korupsi rata-rata sebesar Rp. 100 juta hingga Rp. 500 juta rupiah per kasus. Tindak korupsi dapat segera terdeteksi dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan (< 1 tahun). Media yang paling utama untuk mendeteksi *fraud* yaitu melalui laporan, yang berasal dari karyawan dari pihak internal perusahaan itu sendiri.

Profil pelaku *fraud*, paling banyak berada pada usia 36-45 tahun. Pada usia tersebut, pelaku menduduki posisi sebagai middle management atau level manajer. Latar belakang pendidikan para koruptor, paling banyak adalah tingkat Sarjana dan Magister. *Fraud* terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, hal ini disebabkan karena mereka telah mengenal dengan baik kondisi perusahaan sehingga dapat dengan mudah melakukan *fraud*. Ditemukan juga bahwa motivasi para pelaku untuk berbuat curang adalah keinginan berperilaku yang bermewah-mewah (*extravaganza life style*) sehingga mereka terdorong untuk mencuri uang perusahaan guna memenuhi kebutuhannya. Selain itu, mayoritas pelaku *fraud* juga belum pernah dihukum. Beberapa hasil penelitian ini mencerminkan bahwa *fraud* di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan secara global.

# Pendahuluan

**A**CFE Indonesia Chapter mempunyai Visi yaitu menjadi organisasi para profesional anti-*fraud* yang terbesar di Indonesia, yang terdepan dalam memberikan edukasi, penelitian, advokasi dan pengembangan anti-*fraud*. Survei nasional Fraud 2016 merupakan sebuah upaya berkelanjutan dari ACFE Indonesia Chapter yang didukung oleh Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya untuk mengajak kita semua berpartisipasi secara bersama-sama mengurangi *Fraud*. Seluruh hasil survei yang kami dapatkan akan dipublikasikan demi mencapai visi tersebut dan sebagai sarana edukasi untuk kita semua.

*Fraud* adalah sebuah masalah yang semakin berkembang dewasa ini. Pelaku-pelaku yang melakukan *fraud* pun saat ini tidak hanya terbatas pada golongan atas, namun sudah banyak yang menyentuh lapisan pegawai bawah. Hal ini tentu menjadi satu hal yang perlu kita semua waspadi dan peduli terhadap sekeliling tempat kita bekerja.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) secara rutin setiap dua (2) tahun menerbitkan *Report to The Nationss* (RTTN) dengan responden para CFE di seluruh dunia yang memberikan gambaran tentang *Occupational Fraud and Abuse* yang terjadi di seluruh dunia. Report atau laporan ini sering menjadi acuan berbagai profesi serta akademisi dan praktisi dalam upaya menyampaikan atau memecahkan berbagai permasalahan *fraud*.

Indonesia sebagai negara yang peringkat korupsinya buruk perlu mempunyai gambaran tentang berbagai bentuk dan pola dan bentuk korupsi atau *fraud*. Juga

tentang profil pelakunya. Dengan memperoleh gambaran yang lengkap tersebut, maka strategi anti *fraud* yang sudah dan akan dilaksanakan di Indonesia akan berjalan efektif. Untuk itu diperlukan kajian serta penelitian yang serupa dengan RTTN yang dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kerugian akibat korupsi atau *fraud* di Indonesia, bentuk dan pola korupsi atau *fraud* di Indonesia, profil dari para koruptor atau *fraudster* di Indonesia, dan aspek penting lainnya yang akan diteliti sesuai konteks Indonesia.

Mengacu pada RTTN, maka Survei *Fraud* di Indonesia ini akan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Adapun bentuk kajian dan penelitian ini dilakukan dengan cara (a) melakukan pengisian kuisioner kepada para CFE Member dan Associate Members di Indonesia; (b) melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder perihal koruptor di Indonesia yang datanya diperoleh dari situs Mahkamah Agung pada Direktori Keputusan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian data yang diperoleh dari penelitian ini adalah: a) Data primer: responden CFE Member dan Associate Member dari ACFE Indonesia Chapter; b) Data sekunder: Keputusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Khusus Korupsi sejak 2003 – 2015.

# Informasi Fraud di Indonesia 2016

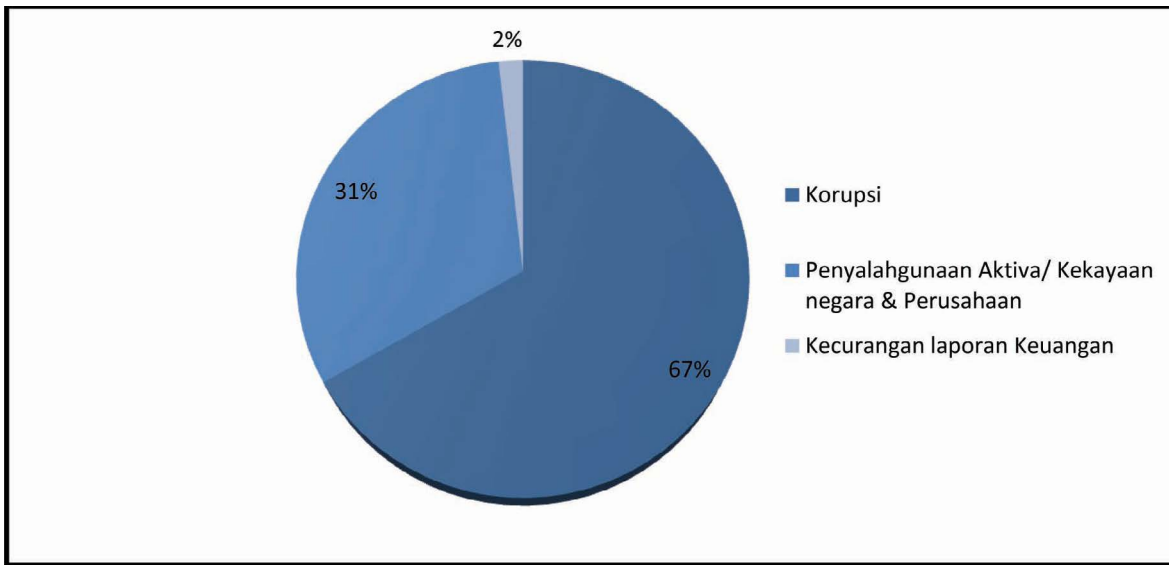
**D**ata untuk profil dan informasi *fraud* didapatkan dari kuesioner yang diberikan melalui online serta kuesioner fisik. Secara keseluruhan, data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut sebanyak 229 data valid. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah bahwa jumlah jawaban dan pertanyaan untuk masing-masing indikator adalah tidak sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertanyaan indikator dapat dijawab lebih dari satu oleh responden berdasarkan dengan masing-masing pengalaman yang bersangkutan.

Data Informasi dalam survai *fraud* dalam Survai *Fraud* Indonesia 2016 dibagi menjadi tujuh bagian. Pada bagian pertama mengandung pertanyaan-pertanyaan yang membahas mengenai frekuensi, kerugian, serta durasi waktu terjadinya *fraud*. Bagian kedua membahas mengenai media terdeteksi/ditemukannya *fraud* serta besarnya kerugian dari masing-masing media tersebut. Bagian ketiga survai ini mencari tahu berdasarkan pengalaman responden mengenai organisasi/lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud*. Bagian keempat berisi mengenai apa yang dapat dilakukan untuk mendeteksi *fraud* lebih awal serta kelemahan dalam organisasi yang mengakibatkan terjadinya *fraud*. Bagian kelima membahas mengenai pelaku *fraud* yang mencakup posisi beserta besarnya kerugian serta lamanya waktu terdeteksi. Bagian keenam membahas mengenai tanda-tanda perilaku dari pelaku *fraud*. Serta bagian ketujuh membahas mengenai kecenderungan penyelesaian tindak *fraud* yang ada di Indonesia berdasarkan pengalaman para responden.

## Frekuensi, Kerugian, serta Durasi Waktu Terjadinya *fraud*

### *Fraud* yang paling banyak ditemukan di Indonesia

Gambar 1 : *Fraud* yang paling banyak di Indonesia

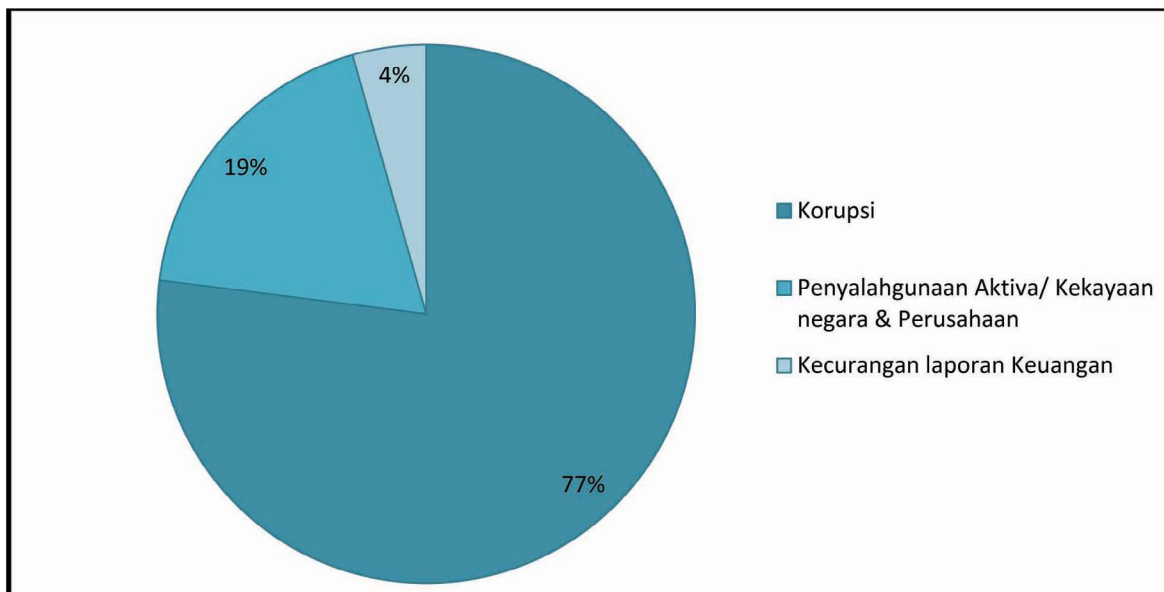


Sumber: data diolah, 2016.

Berdasarkan hasil survai yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebanyak 154 responden survai *fraud* Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hal ini berbeda dengan hasil *Report to The Nationss* (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis *fraud* terbanyak ditemukan dalam bentuk *asset missappropriation*. Dalam survai *fraud* Indonesia sendiri, *asset missappropriation* dipilih oleh 71 responden atau 31% dari jumlah responden. *Fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2%. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden. Hal ini disebabkan oleh banyaknya publikasi di masyarakat mengenai korupsi.

## Fraud yang paling merugikan di Indonesia

Gambar 2 : Fraud yang Paling Merugikan di Indonesia



Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, responden menilai bahwa korupsi adalah jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Sebanyak 178 responden atau 77% dari keseluruhan responden, menyatakan bahwa korupsi merupakan tindak *fraud* yang paling merugikan di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Data Fraud yang Paling Merugikan di Indonesia**

No.	Jenis Fraud	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Korupsi ( <i>corruption</i> )	178	77%
2.	Penyalahgunaan Aktiva /Kekayaan Organisasi ( <i>Asset missappropriation</i> )	41	19%
3.	Kecurangan Laporan Keuangan ( <i>Financial Statement Fraud</i> )	10	4%

Sumber: data kuesioner, diolah (2016)

Hal ini berbeda dengan survei yang dilakukan oleh ACFE (2016) yang menyatakan bahwa *fraudulent financial reporting*-lah yang paling merugikan. Perbedaan ini diduga karena di Indonesia berbagai kejahatan yang berasal dari kejahatan laporan keuangan belum banyak terungkap, seperti kejahatan penipuan informasi di bursa efek, serta kejahatan karena penipuan informasi pajak.

### **Kerugian akibat *Fraud***

Berdasarkan data ini tampak bahwa para responden di Indonesia menyatakan bahwa kerugian yang terbesar adalah berasal dari tindak korupsi. Di Indonesia berapa pun tingkat kerugian yang muncul dari *fraud*, kerugian dari korupsilah yang terbesar.

*Fraud* dalam bentuk korupsi memiliki modus kerugian sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Pada grafik memang dinyatakan bahwa persentase tertinggi pada angka Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. (lihat tabel)

**Tabel 2**  
**Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud***

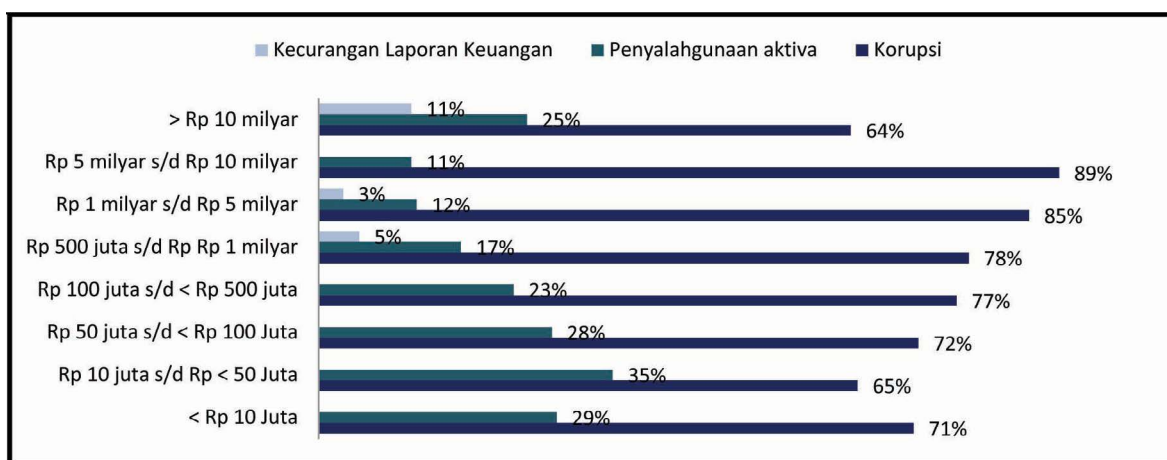
		<b>Korupsi (<i>corruption</i>)</b>	<b>Penyalahgunaan Aktiva /Kekayaan Organisasi (<i>Asset missappropriation</i>)</b>	<b>Kecurangan Laporan Keuangan (<i>Financial Statement Fraud</i>)</b>
<b>1</b>	< Rp 10 Juta	5	2	0
<b>2</b>	Rp 10 juta sampai dengan Rp < 50 Juta	11	6	0
<b>3</b>	Rp 50 juta sampai dengan < Rp 100 Juta	18	7	0
<b>4</b>	Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta	36	11	0
<b>5</b>	Rp 500 juta sampai dengan Rp Rp 1 milyar	32	7	2
<b>6</b>	Rp 1 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	29	4	1
<b>7</b>	Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	16	2	0
<b>8</b>	> Rp 10 milyar	23	9	4

Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Sementara yang perlu diperhatikan bahwa meskipun memiliki persentase terkecil (4%) secara keseluruhan, namun kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* laporan keuangan cukup besar. Hal ini dibuktikan dari survei, di mana 4 dari 10 responden (40%) mengatakan bahwa kerugian akibat *fraud* laporan keuangan adalah di atas 10 milyar rupiah.

Besarnya kerugian akibat jenis *fraud* ini berbeda dengan hasil survei ACFE (2016) yang menyatakan bahwa kerugian terbesar diakibatkan oleh *fraud* jenis *fraud* laporan keuangan sebesar \$1.000.000. Sebab mengapa kerugian *fraud* dari jenis korupsi ini banyak akan coba dijelaskan satu per satu melalui setiap *item* indikator selanjutnya.

Gambar 3 : Kerugian akibat *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud*

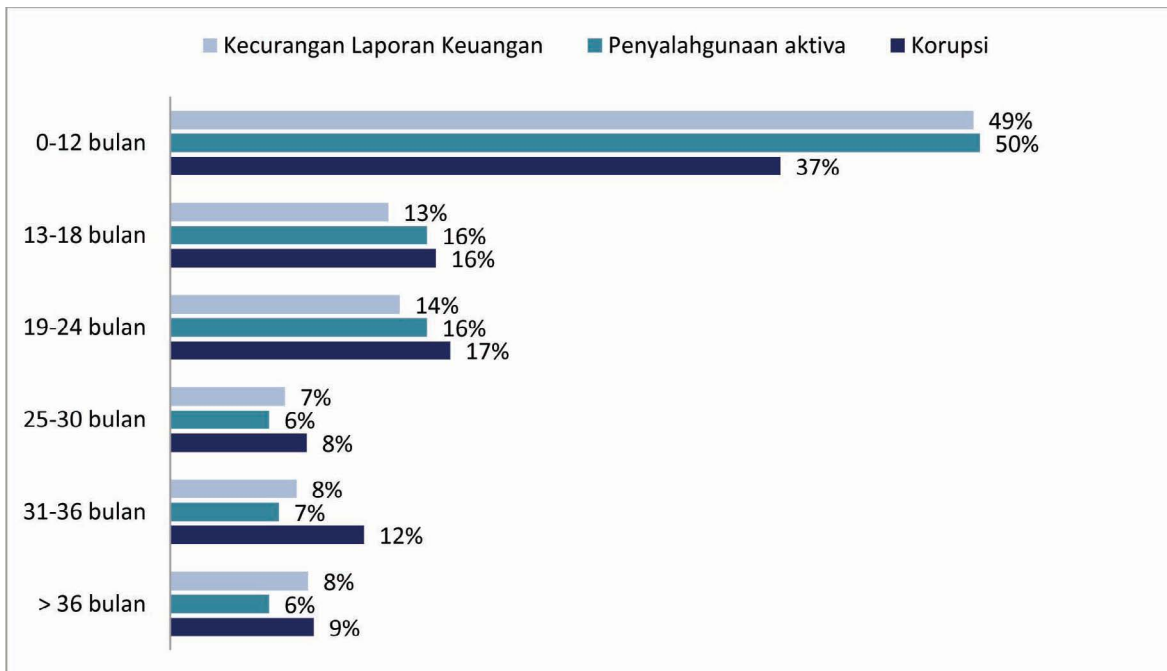


Sumber: data diolah, 2016.

### Lama Pendeteksian Setiap Jenis *Fraud*

Guna memberikan gambaran mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi terjadinya *fraud*, kami memberikan pertanyaan mengenai lama terdeteksinya setiap jenis *fraud* pada responden berdasarkan pengalaman. Secara umum, seluruh jenis *fraud* membutuhkan waktu 12 bulan untuk waktu pendeteksiannya.



Gambar 4 : Lama Pendeteksian Setiap Jenis *Fraud*

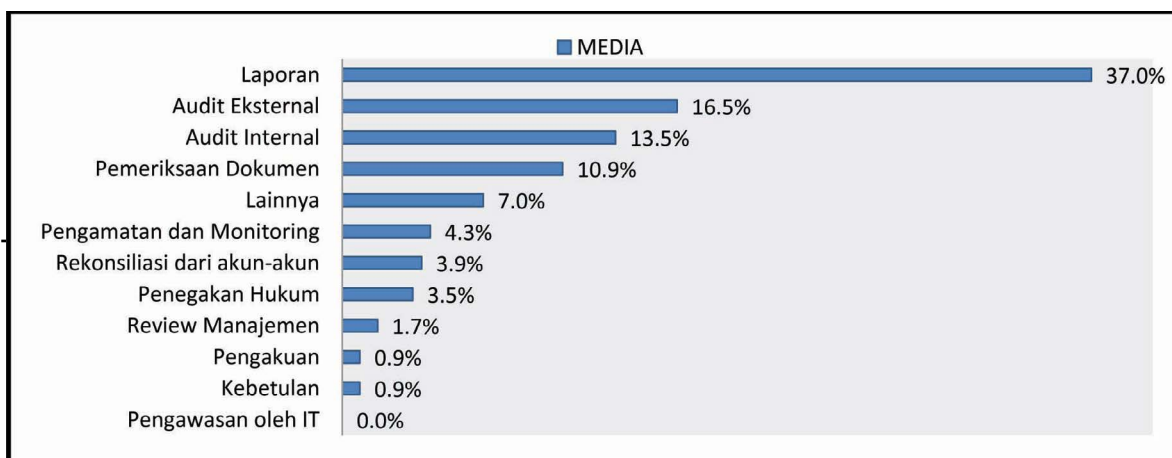
Sumber: diolah (2016)

## Deteksi / Temuan Awal *Fraud*

### Media Ditemukannya *Fraud*

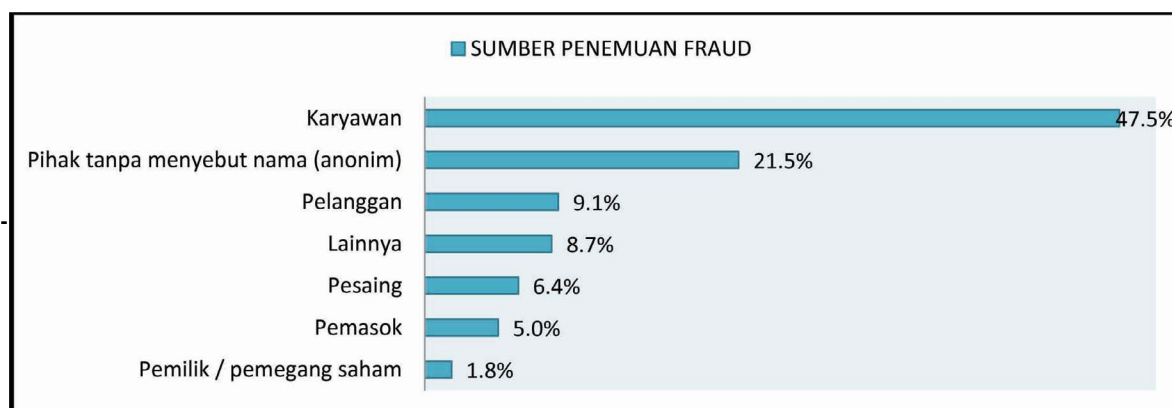
Berdasarkan gambar 5 diketahui bahwa para responden sepakat laporan menjadi media atau sarana utama ditemukannya *fraud* di Indonesia. Laporan di sini merupakan informasi dari pihak internal yaitu karyawan perusahaan tersebut. Hal ini berarti diperlukan sistem yang membuat masyarakat berani untuk mengungkapkan adanya *fraud*. Pada beberapa lembaga di Indonesia, system ini sudah ada, seperti *KPK Whistleblower's System*, *DirJen Pajak Whistleblowing System*, *OJK Whistleblowing System*. Namun payung hukum berupa Undang-Undang belumlah ada. Oleh karenanya perlu didorong adanya Undang-Undang Whistleblower untuk menurunkan secara lebih sistematis peringkat korupsi di Indonesia.

Gambar 5 : Media Ditemukannya *Fraud*



Sumber: data diolah, 2016

Gambar 6 : Sumber Penemuan *Fraud*



Sumber : data diolah, 2016

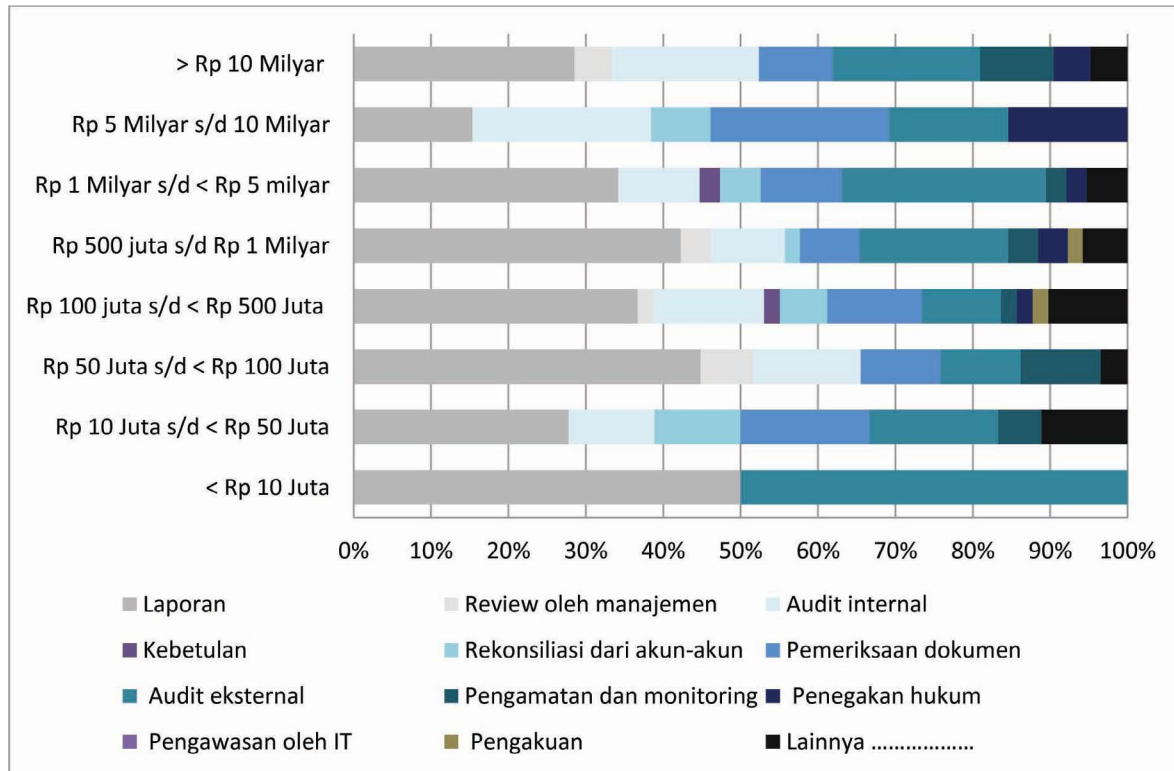
Menjawab gambar 5 yang menyatakan bahwa laporan merupakan media terbesar ditemukannya *fraud*, maka gambar 6 menerangkan bahwa sumber dari laporan tersebut adalah dari karyawan perusahaan itu sendiri. Hal ini juga sama dengan RTTN yang dipublikasikan oleh ACFE yang menyebutkan bahwa sumber utama dari ditemukannya *fraud* adalah karyawan.

Dua hasil survai ini dapat ditarik pemikiran logis bahwa *fraud* yang ada di dalam perusahaan, entah itu yang dipublikasi atau hanya ditemukan secara intern memang bersumber dari informasi/laporan yang berasal dari karyawan. Karyawan tidak

hanya dapat menyampaikan melalui laporan, namun juga dapat menyampaikan apa yang ia ketahui ketika ada proses audit eksternal untuk laporan keuangan (16.5%) dan audit internal untuk operasional perusahaan (13.5%).

### Jumlah Kerugian *Fraud* berdasarkan Media Ditemukannya *Fraud*

Gambar 7 : Jumlah Kerugian *Fraud* Berdasarkan Media Ditemukannya *Fraud* keseluruhan



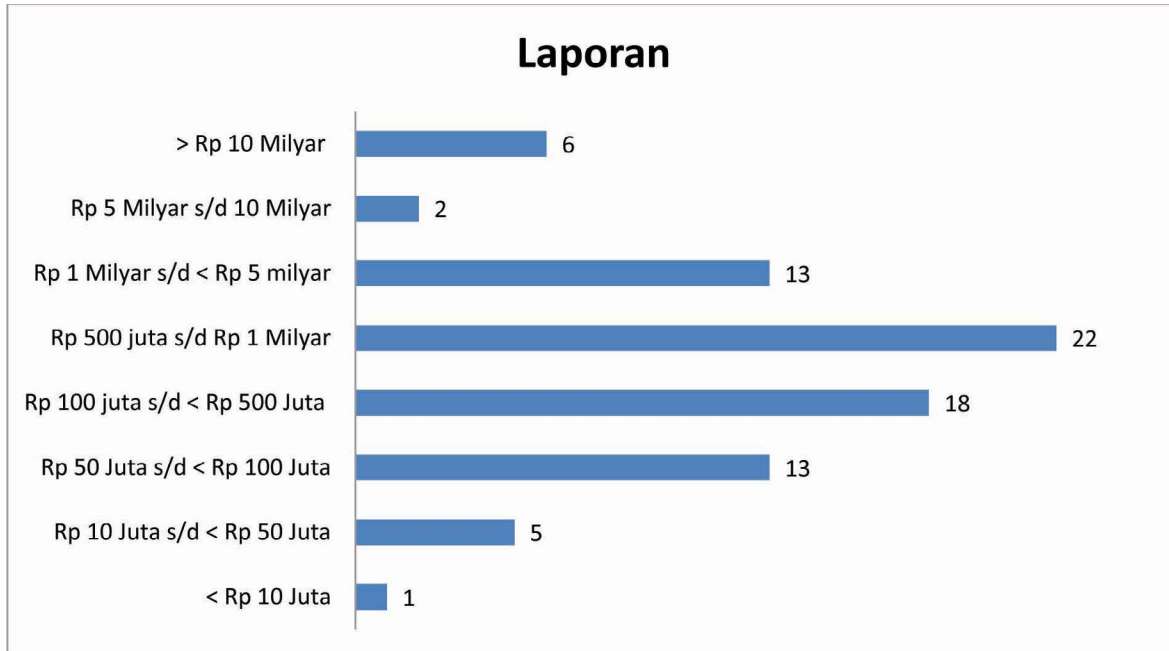
Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan hasil survai yang tampak pada gambar 6, dapat dijelaskan bahwa besarnya kerugian akibat *fraud* adalah Rp 500 juta sampai Rp 1 milyar.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai besarnya kerugian berdasarkan jenis media ditemukannya *fraud*, berikut ini disajikan breakdown untuk masing-masing jenis media dan besarnya kerugian *fraud* secara berurutan dari media pendeteksian terbesar.

## Laporan

Gambar 7 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Media Laporan

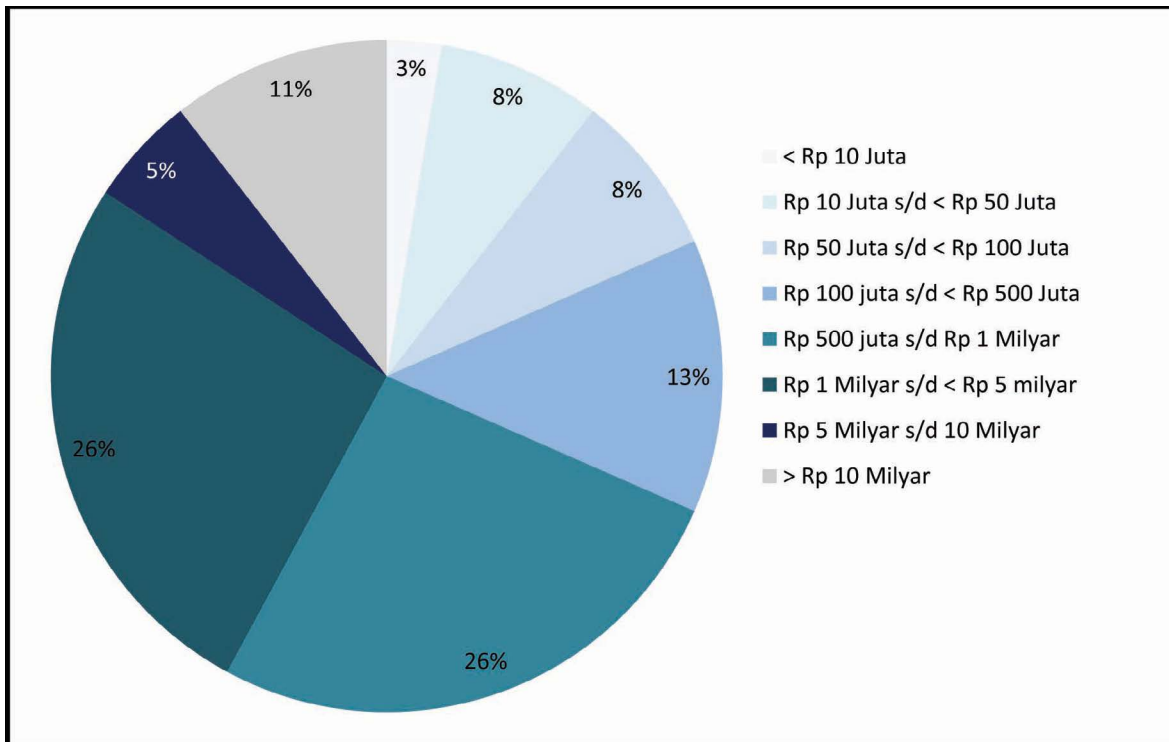


Sumber: data diolah, 2016

Laporan dipilih oleh 37% responden, atau 80 responden. Berdasarkan gambar 7, dapat diketahui bahwa banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* berada dalam kisaran Rp 100 juta sampai dengan Rp 1 milyar (50%). Rincian dalam kisaran tersebut adalah range Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta sebanyak 22%, sementara Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar sebanyak 22%.

## Audit Eksternal

Audit eksternal banyak dipandang hanya sebagai cara 'mengawasi' wajar atau tidaknya laporan keuangan. Namun, hasil survai ini menunjukkan bahwa audit eksternal juga dapat menjadi satu media untuk mendeteksi terjadinya *fraud*. Walaupun memiliki persentase 16.5% atau 38 dari total keseluruhan, namun range kerugian untuk pendeteksian melalui audit eksternal lebih besar daripada laporan. Kerugian yang ditemukan dapat mencapai Rp 5 milyar (26%).

Gambar 8 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Audit Eksternal

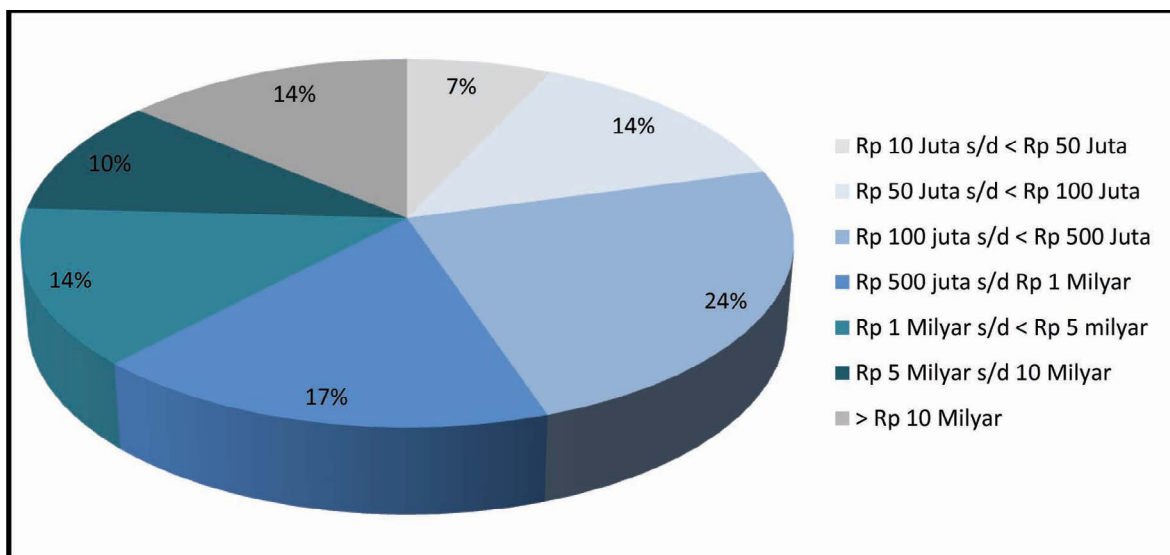
Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Hal ini menjadi sebuah masukan pula bahwa auditor eksternal memang perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai *fraud*. Karena selama ini *fraud* lebih dikenal oleh umum bagi kalangan auditor internal yang lebih fokus pada operasional perusahaan.

### Melalui Audit Internal

Audit internal merupakan satu unit pengawasan yang sering dibentuk oleh perusahaan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Pada survai ini, sebanyak 13.5 % atau 29 responden memilih audit internal untuk menemukan *fraud*. Hasil ini menunjukkan bahwa audit internal belum berperan untuk menemukan *fraud*.

Gambar 9 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Audit Internal



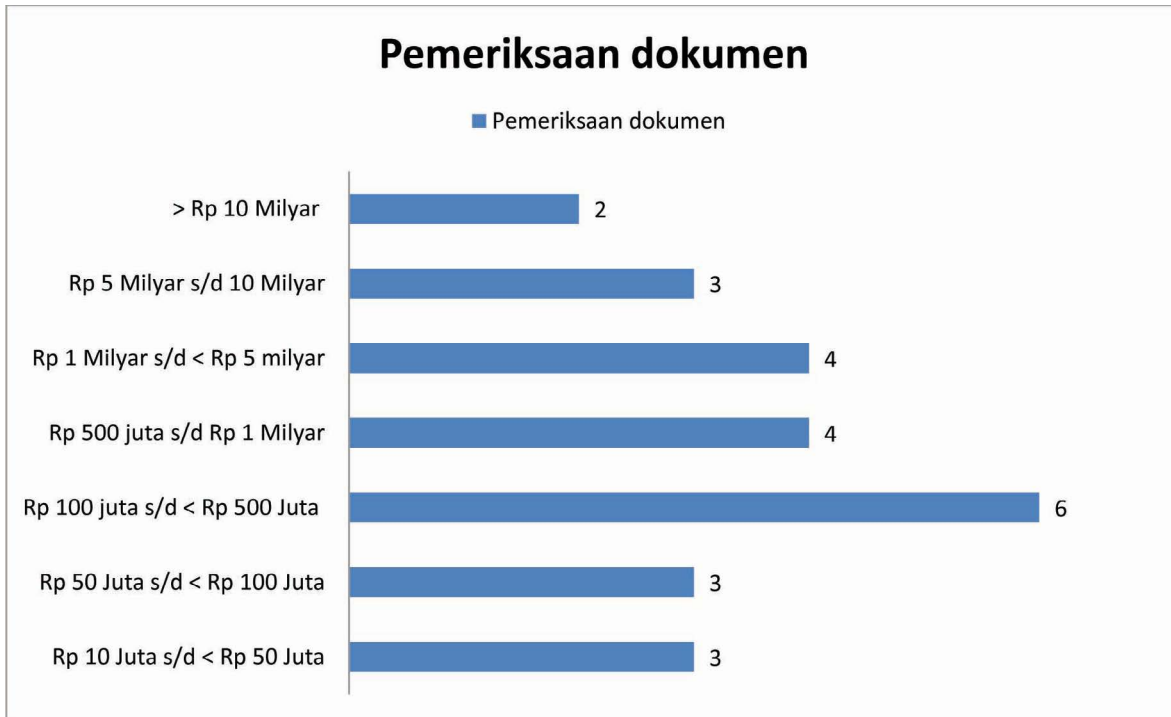
sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Pada survai ini besarnya kerugian terbanyak yang dapat dideteksi oleh satuan audit internal perusahaan adalah sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta (24%). Namun yang perlu diperhatikan adalah sama banyaknya responden yang memilih angka lebih dari Rp 10 milyar dapat dijangkau dari pendeteksian kerugian melalui audit internal dan eksternal. Hal ini menunjukkan audit internal dinilai oleh responden lebih efektif dari audit eksternal dalam menemukan *fraud* dari sisi nilainya (Gambar 9). Meskipun berdasarkan gambar 5 audit eksternal lebih dapat menemukan *fraud* dibanding audit internal.

### Melalui Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan dokumen merupakan salah satu media yang juga sering dilakukan untuk mendeteksi *fraud*. Pemeriksaan dokumen pendukung untuk setiap transaksi dan kegiatan operasional memiliki peran besar dalam pendeteksian *fraud*. Berdasarkan survai yang telah dilaksanakan, besaran kerugian melalui pemeriksaan dokumen paling banyak ditemukan pada range Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta dengan persentase 24% atau ditemukan pada 6 kasus berdasarkan pada pengalaman responden.

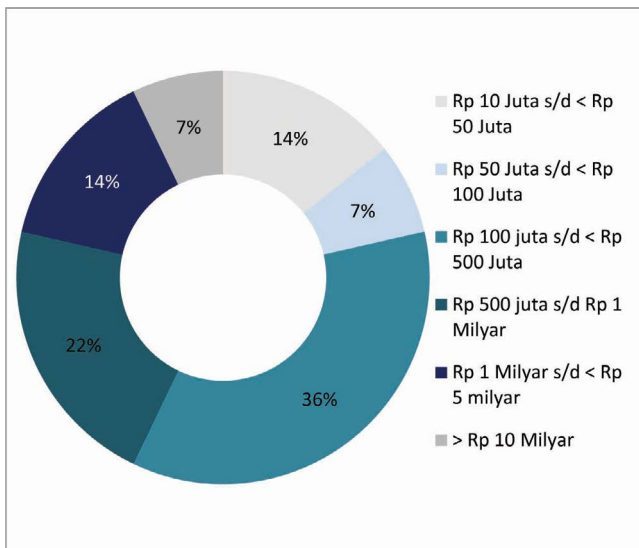
Gambar 10 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Pemeriksaan Dokumen



Sumber: data diolah, 2016

### Lainnya

Gambar 11 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan media Lainnya



Media lainnya dalam kuesioner ini dimaknai dengan beberapa jawaban dari responden. Sebanyak 10 dari 16 responden yang memilih, menyatakan pilihan lainnya ini dapat dimaknai sebagai pengaduan. Kemudian dua lainnya menyatakan whistleblower. Dan satu responden menyatakan media lainnya ini dapat berupa tip. Sisanya tidak memberikan jawaban spesifik mengenai media yang dimaksud.

sumber : data kuesioner, diolah (2016)

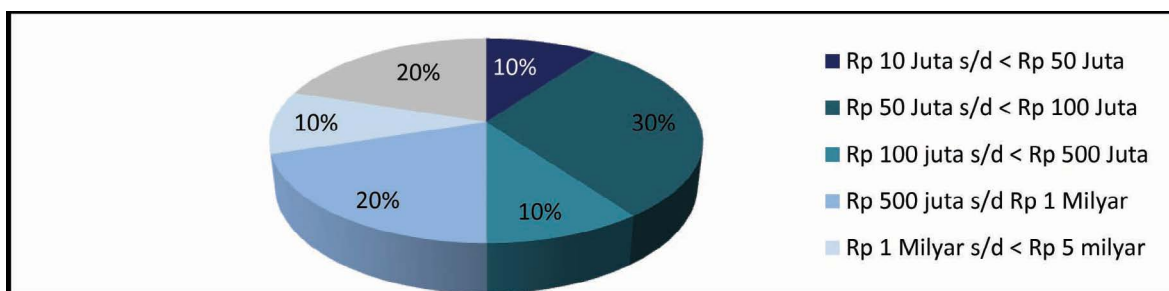
Media tip (laporan) menjadi satu perbedaan dalam hasil survei yang kami lakukan dengan hasil RTTN ACFE (2016). Tip menjadi media yang paling banyak dipilih dalam *Report To The Nations* (2016) untuk aspek *Fraud Detection Method by Perpetrators's Relationship to Victim*. Tip ini cenderung dilakukan untuk kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Sementara itu pengaduan dan *whistleblower* menunjukkan kekonsistenan kecenderungan peran perusahaan untuk menyediakan sistem pengaduan anonim atau *whistleblower* yang ingin disampaikan dalam survei ini.

Dalam pilihan *lainnya* ini, nilai kerugian terbanyak berada pada range Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta (36%) sehingga konsisten dengan besarnya kerugian *fraud* yang banyak terjadi di Indonesia.

### Pengamatan dan *Monitoring*

Dalam survei ini didapatkan data bahwa monitoring bukan merupakan pilihan terbanyak, namun dari jawaban responden didapat kesimpulan bahwa monitoring sebenarnya merupakan media yang efektif dalam mendeteksi *fraud*. Hal ini dibuktikan bahwa dengan monitoring, besarnya kerugian yang paling banyak ditemukan adalah 50 sampai dengan kurang dari 100 juta. Besaran kerugian yang paling banyak ditemukan berdasarkan pengalaman responden adalah Rp 50 juta sampai dengan kurang dari Rp 100 juta (30%). Namun, sebanyak 20% kasus dengan kerugian Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar juga berhasil terdeteksi melalui media pengamatan dan monitoring ini. Sehingga dari survei ini, diharapkan setiap perusahaan dapat menyiapkan suatu sistem internal kontrol yang memadai sebagai menjadi sarana follow up sistem audit internal yang memadai.

Gambar 12 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Pengamatan dan *Monitoring*

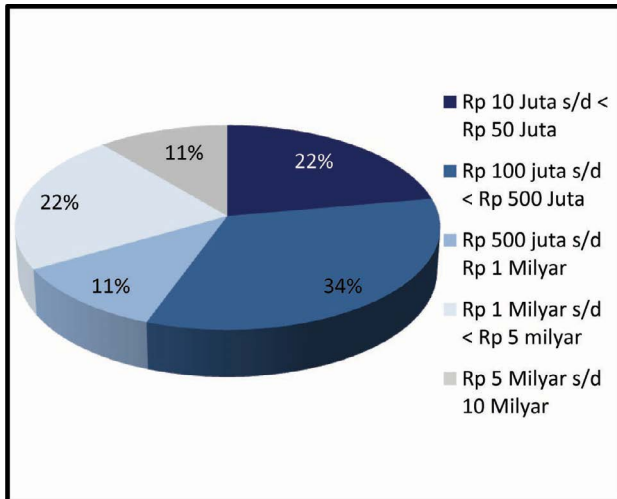


Sumber : data kuesioner, diolah (2016)



## Media rekonsiliasi akun-akun

Gambar 13 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Rekonsiliasi Akun-akun

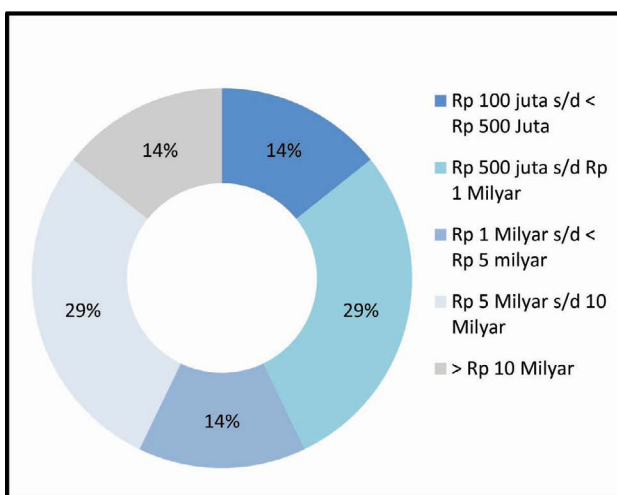


Sumber: data diolah, 2016

Pada rekonsiliasi akun frekuensi kerugian yang paling banyak terdeteksi terjadi pada range Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta, yaitu sebanyak 3 kasus dengan persentase 34% dari keseluruhan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ACFE (2016), *fraud* dengan skema non-kas maupun yang berhubungan dengan cek masing-masing memiliki persentase 20% dan 10%. Sehingga, secara implisit dapat dikatakan proses rekonsiliasi ini merupakan metode yang juga dibutuhkan untuk mendeteksi terjadinya *fraud*.

## Penegakan Hukum

Gambar 14 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Penegakan Hukum

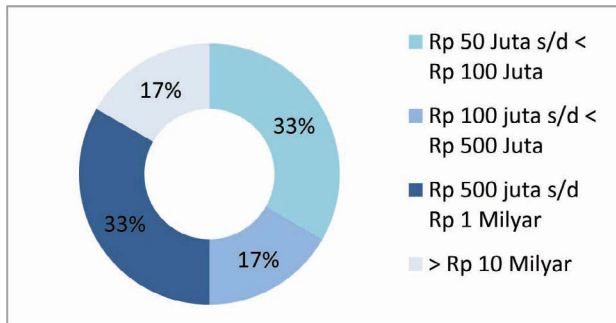


Sumber: data diolah, 2016.

Berdasarkan hasil survai yang telah disajikan pada gambar, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum sudah cukup efektif. Hal ini dilihat dari kerugian yang dapat terdeteksi dengan media penegakan hukum. *Range* kerugian yang paling banyak (29%) dapat terdeteksi dengan *law enforcement* ini adalah Rp 500 milyar sampai dengan Rp 100 milyar.

## Review oleh manajemen

Gambar 15 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Review oleh Manajemen



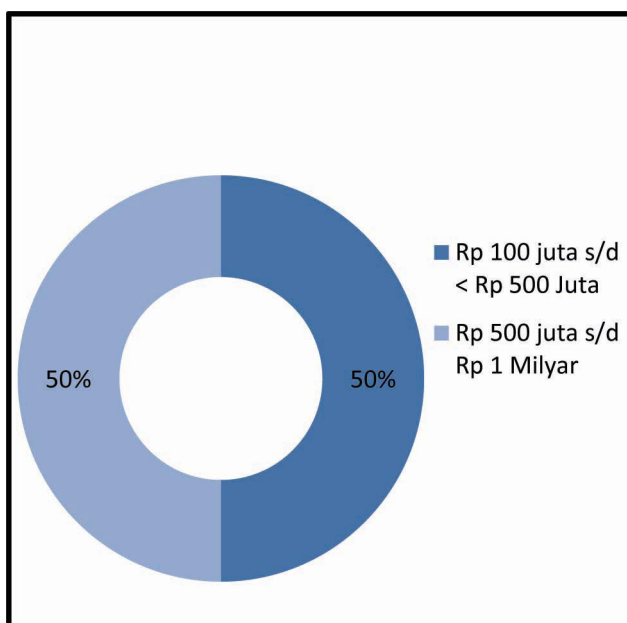
Sumber: data diolah, 2016

*Review* oleh manajemen merupakan media pendeteksian *fraud* yang juga dipertimbangkan menjadi sumber pendeteksian *fraud*. Hal ini dikarenakan *review* secara berkala dapat menjadi sebuah tindakan preventif atas *fraud* di perusahaan.

Hasil survai ini berbeda dengan RTTN (2016) yang menyatakan bahwa *review* manajemen berada di posisi ketiga dalam pendeteksian awal terjadinya *fraud* secara keseluruhan. Sedangkan untuk perusahaan kecil, *review* manajemen berada pada posisi kedua.

## Pengakuan

Gambar 16 : Besarnya Kerugian ketika *Fraud* Ditemukan dengan Review oleh Manajemen



Sumber: data diolah, 2016

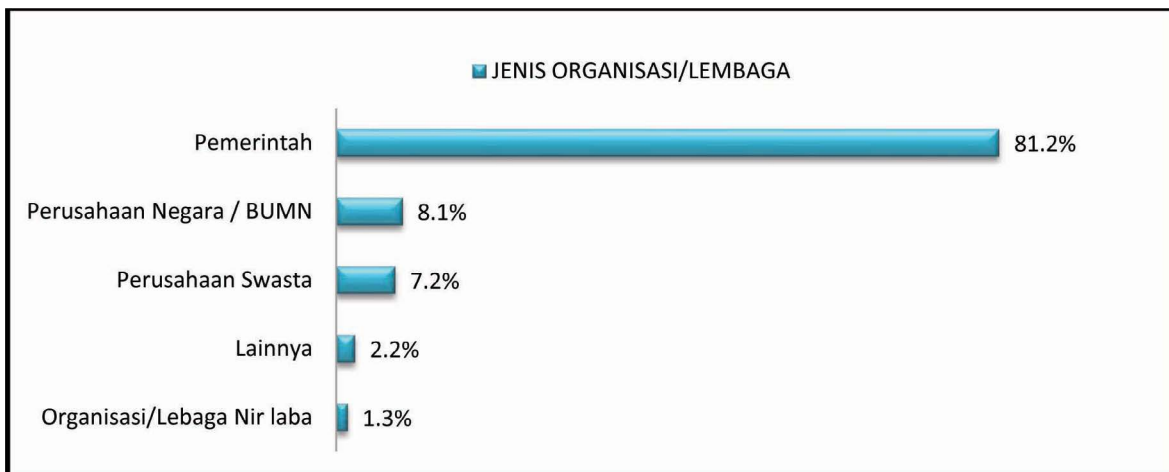
Pengakuan dari pelaku seharusnya menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan atau lembaga terkait. Namun, baik dalam penelitian yang dilakukan oleh ACFE (2016) maupun survai ini persentase yang ditunjukkan untuk media pengakuan masih rendah. Dalam RTTN (2016), pengakuan hanya mendapatkan 1% dari keseluruhan untuk metode pendeteksian *fraud*. Begitu pula dengan survai ini, pengakuan memiliki persentase 0.9% (2 kasus).

## Organisasi/Lembaga yang Paling Dirugikan oleh *Fraud*

### Organisasi/Lembaga yang Dirugikan akibat *Fraud*

Pada survei ini didapatkan informasi bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang 'mutlak' dirugikan atas terjadinya *fraud*. Mayoritas responden sebanyak 81.2% memilih pemerintah sebagai jenis/lembaga yang dirugikan akibat *fraud*. Kemudian diikuti oleh perusahaan negara//BUMN sebanyak 8.1% serta perusahaan swasta 7.2%. Pada poin lainnya yang mendapat respon dari responden (2.2%) sering diwakilkan dengan masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri.

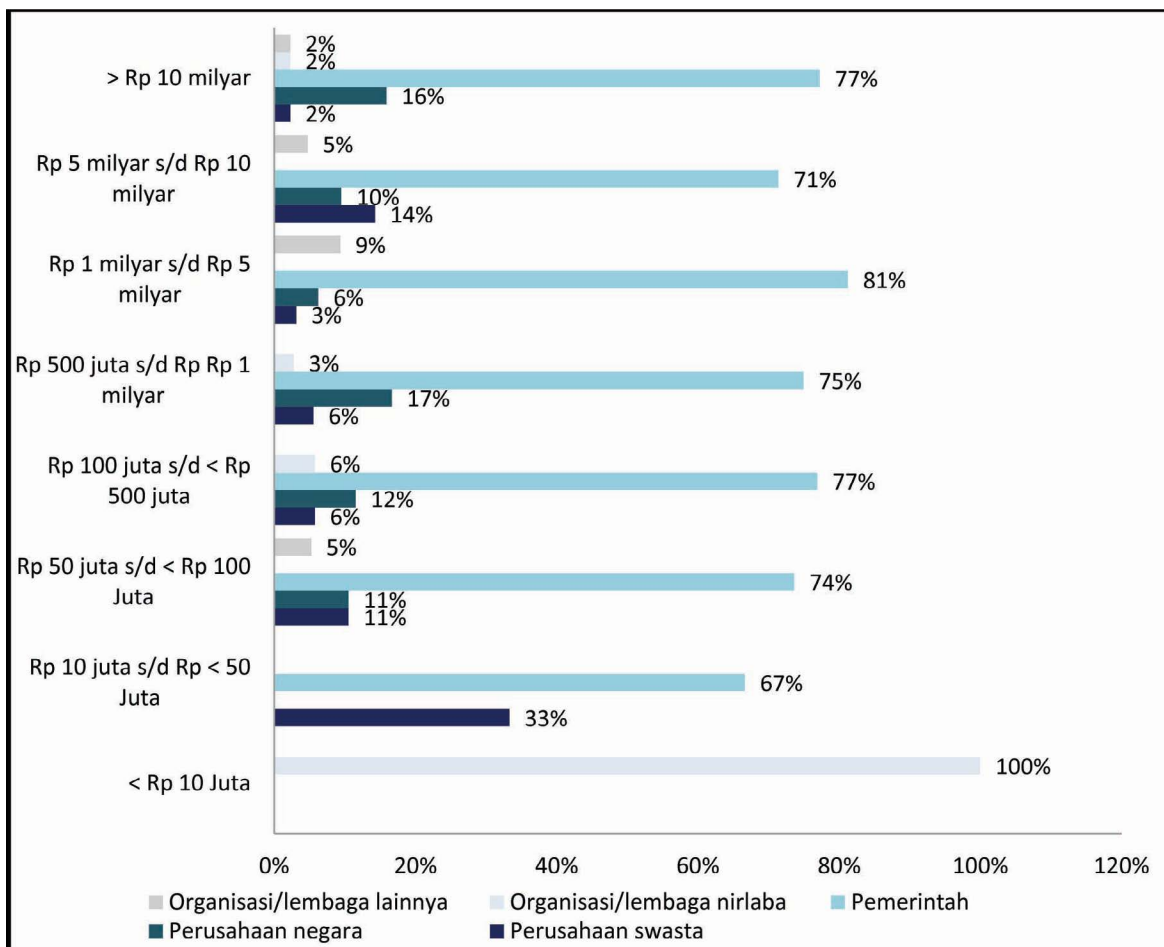
Gambar 17: Organisasi/Lembaga yang Dirugikan Akibat *Fraud*



Sumber : data diolah, 2016

## Kerugian akibat *Fraud* berdasarkan Jenis Organisasi/Lembaga

Gambar 18 : Kerugian Akibat *Fraud* Berdasarkan Jenis Organisasi/Lembaga



Sumber: data diolah, 2016

Persentase yang lebih 100% pada grafik, disebabkan oleh responden yang diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu jawaban pada poin kuesioner.

## Industri yang Dirugikan oleh *Fraud*

Gambar 19 di bawah ini menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikandengan adanya korupsi adalah pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan berstatus BUMN sebanyak 58.8%. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE (2016) yang menempatkan industri keuangan dan perbankan pada posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat *fraud* dengan persentase

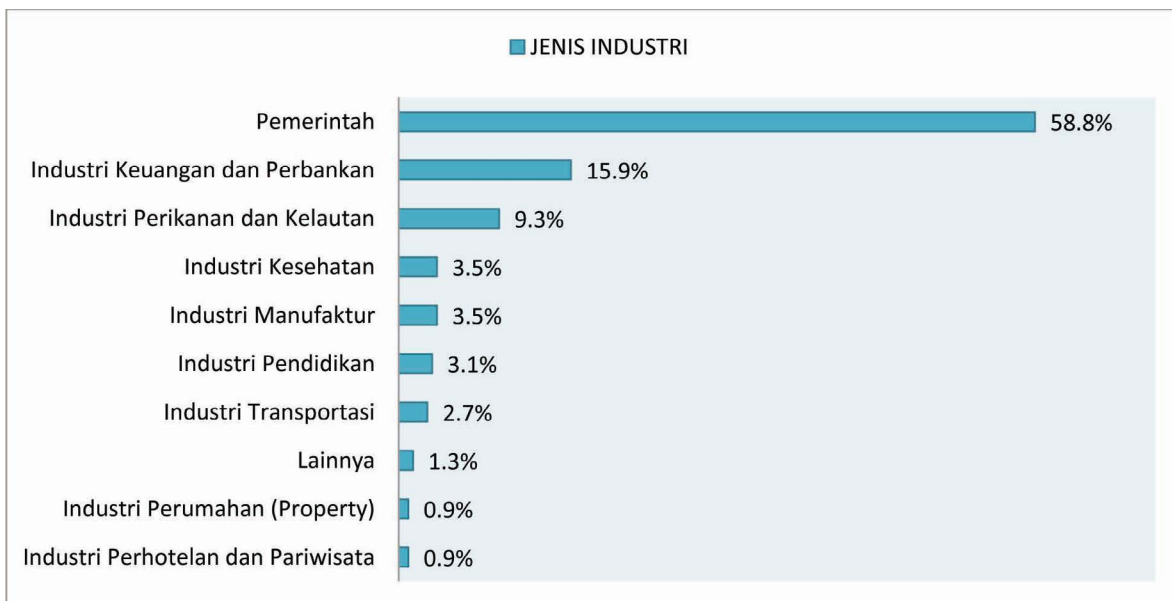
16.8%. Dalam survei *fraud* Indonesia 2016, industri keuangan dan perbankan menjadi industri yang paling dirugikan kedua dengan persentase 15.9%. Sehingga terjadi *vice versa* mengenai jenis industri yang paling dirugikan oleh *fraud* antara survei ACFE Indonesia Chapter dan ACFE (2016).

Secara berurutan, industri-industri yang dirugikan tersebut terdiri dari industri perikanan dan kelautan, industri kesehatan, industri manufaktur, industri pendidikan, industri transportasi, lainnya, industri perumahan, serta industri perhotelan. Pada poin lainnya, responden sering mewakilkannya dengan rakyat.

Perbedaan ini dapat diakibatkan oleh kecenderungan para pelaku *fraud* di Indonesia sering memanfaatkan proyek yang dilakukan oleh pemerintah (contoh : wisma atlet di Hambalang dan dana haji) untuk melakukan kejahatan. Sehingga, secara langsung para pelaku tersebut melakukan korupsi yang merugikan pemerintah dan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.

Hal yang perlu diingat dari grafik yang industri yang paling dirugikan oleh *fraud* ini adalah bahwa hasil ini tidak serta merta membuktikan bahwa sebuah industri lebih berisiko terhadap *fraud* dari industri lain. Data ini mengutamakan pada sektor-sektor industri berdasarkan pengalaman para responden.

Gambar 19 : Industri yang Dirugikan oleh *Fraud*



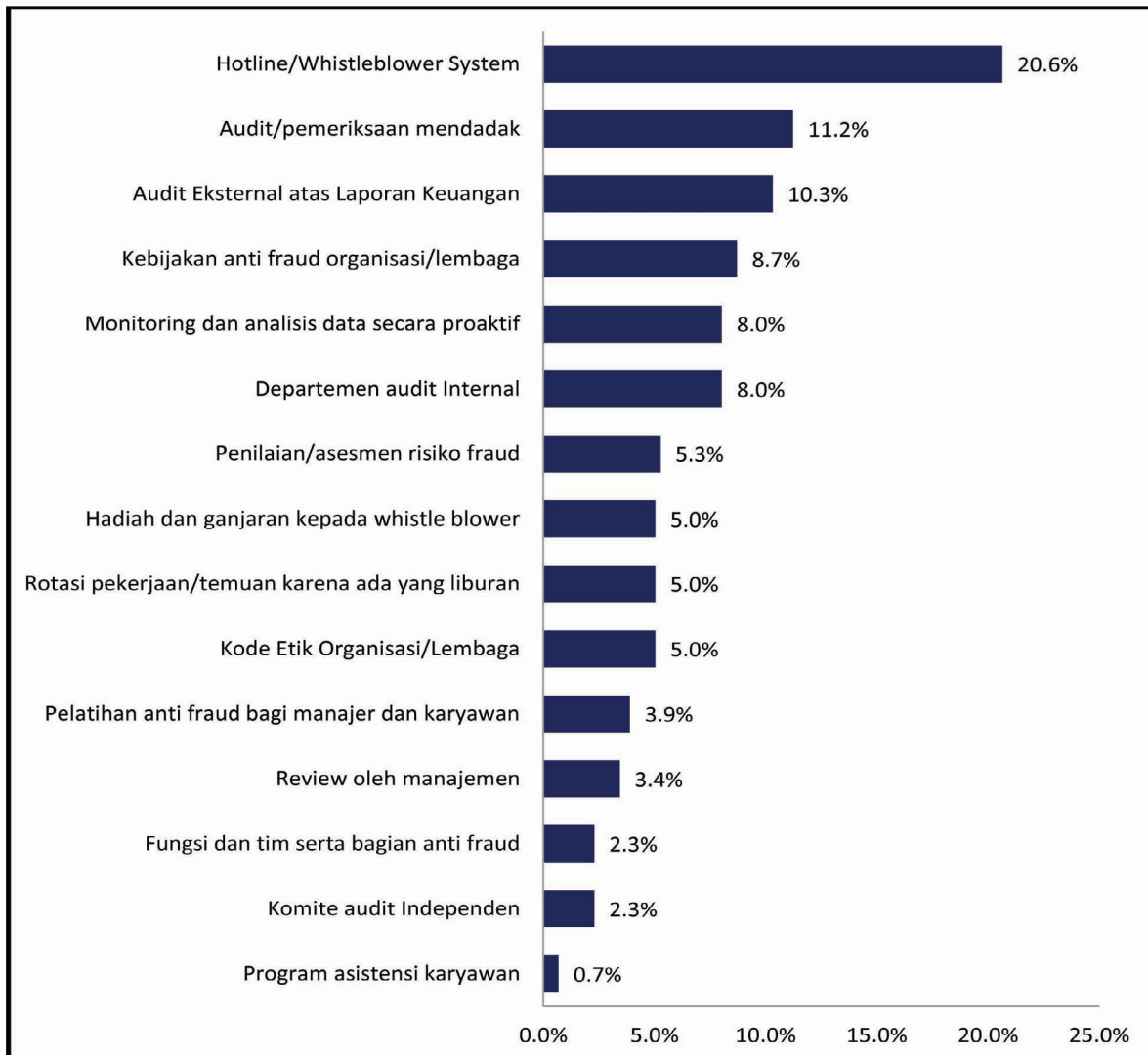
Sumber : diolah (2016)

## Pendeteksian *Fraud*

### Anti Fraud Control

Berdasar data di atas metode pencegahan *fraud* yang paling baik dan efektif adalah melalui mekanisme *whistleblowing hotline*. Namun sampai dengan saat ini media ini belum banyak digunakan oleh perusahaan dan juga belum banyak diterapkan. Pada perusahaan yang telah menerapkan *whistleblowing hotline* belum merasakan efektivitasnya. Hal ini dikarenakan belum adanya perlindungan atau dasar hukum bagi *whistleblower*. Oleh karenanya di Indonesia perlu keberadaan UU tersebut.

Gambar 20 : Anti *Fraud* Control



Sumber: data diolah, 2016.

## Kelemahan Pengendalian yang mengakibatkan *Fraud*

Berdasarkan gambar tampak bahwa di Indonesia sikap atasan yang tidak menjadi teladan merupakan bentuk kelemahan yang utama yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Atasan justru menjadi pelaku utama *fraud*. Hal ini tercermin dari banyaknya pejabat, baik menteri, gubernur, bupati/walikota yang dipenjara karena korupsi.

Gambar 21 : Kelemahan Pengendalian yang Mengakibatkan *Fraud*



Sumber: data diolah, 2016

Selain itu, langkanya pengawasan internal yang hanya 19.3% dan mengesampingkan pengawasan internal (16.2%) mengakibatkan tindakan *fraud* ini dapat dilakukan. Padahal dalam survei *fraud* Indonesia pada poin media pendeteksian *fraud*, pengawasan internal yang notabene dilakukan oleh pihak auditor internal merupakan media efektif dalam pendeteksian sekaligus pencegahan *fraud*.

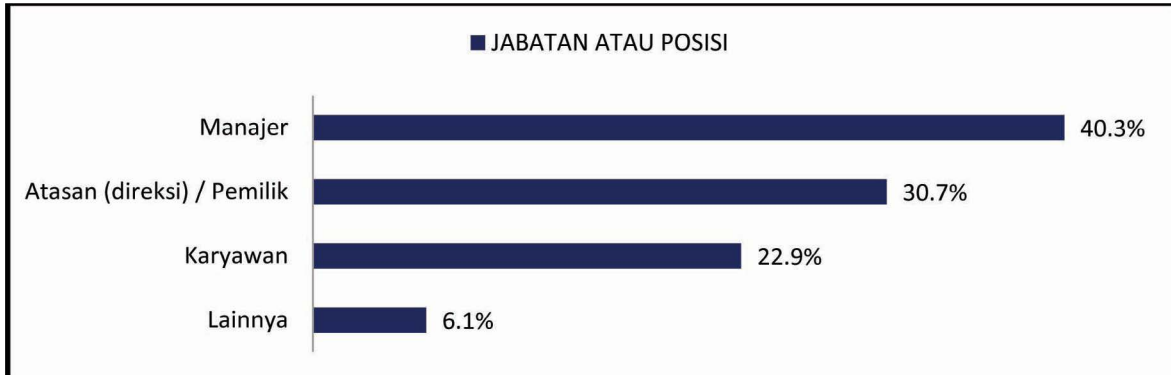
## Pelaku *Fraud*

### Jabatan Pelaku *Fraud*

Di Indonesia menurut pendapat responden, bahwa manajer merupakan jabatan yang paling banyak melakukan *fraud*. Selanjutnya diikuti oleh atasan (direksi) atau pemilik. Berbeda dengan *Report to the Nationss* (2016) yang mengungkapkan bahwa karyawan lah yang merupakan pelaku *fraud* yang paling banyak. Hal ini memang

sejalan dengan fenomena yang sekarang terjadi di Indonesia, bahwa tingkat *middle managerial*-lah yang paling banyak melakukan *fraud*.

Gambar 22 : Jabatan atau Posisi Pelaku *Fraud*

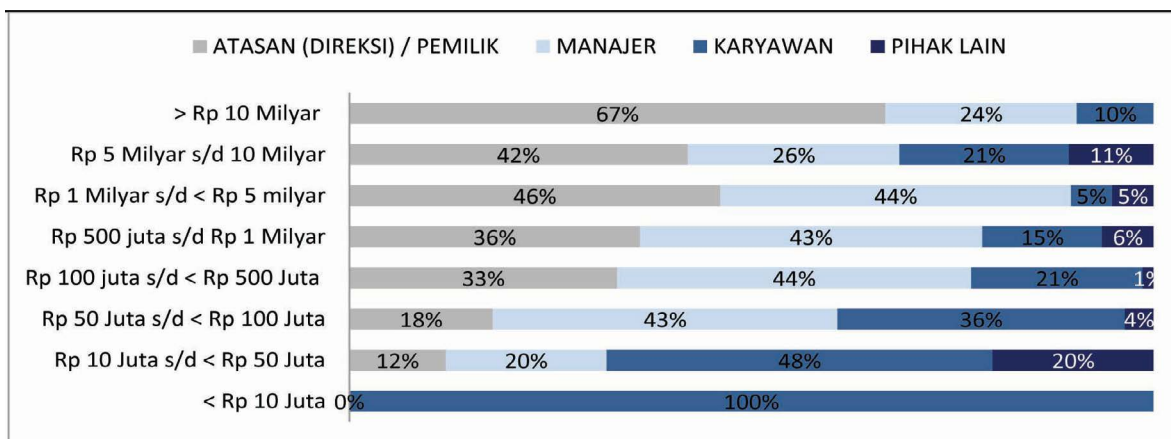


Sumber: data diolah, 2016.

### Kerugian akibat *Fraud* berdasarkan Jabatan

Untuk setiap jabatan, angka yang paling banyak muncul ketika terjadi *fraud* adalah Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Secara umum, semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi pula *fraud* yang dihasilkan. Pemilik memang bukan posisi yang paling banyak dalam melakukan *fraud*. Namun, memiliki 'efektivitas' dalam hal kerugian. Dari 20 kasus *fraud* berdasarkan jabatan yang mengakibatkan kerugian di atas Rp 10 milyar, 14 kasus (67%) merupakan kerugian yang diakibatkan oleh atasan (direksi)/pemilik.

Gambar 23 : Kerugian akibat *Fraud* Berdasarkan Jabatan



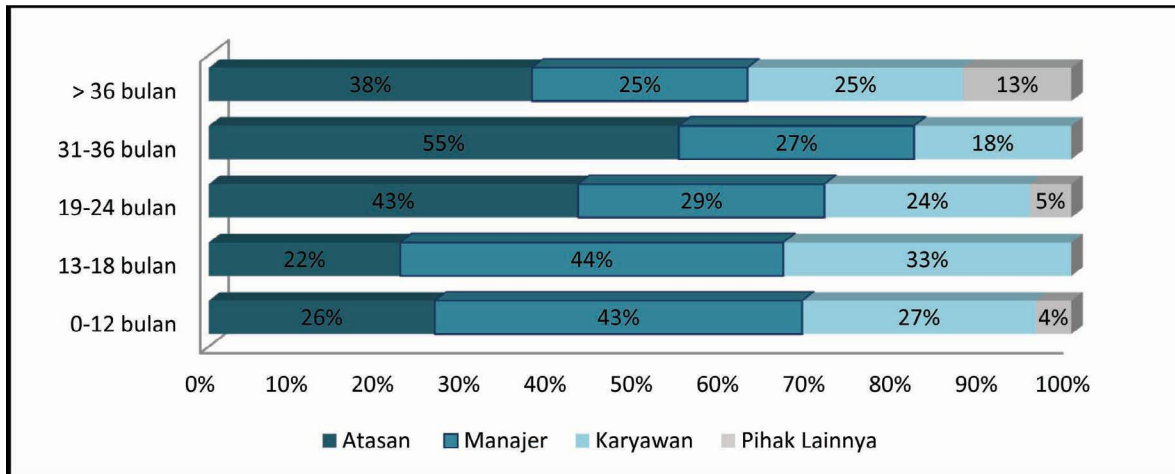
Sumber: data diolah, 2016



### Lama ditemukannya *fraud* berdasarkan posisi pelaku *fraud*

Secara umum, *fraud* dapat dideteksi dalam rentang waktu 0-12 bulan. Di Indonesia, gambaran hasil survai menyatakan terdapat berbagai variasi perihal lamanya terdeteksinya *fraud* berdasarkan posisi/jabatan pelakunya. Namun sama dengan *Report to The Nations*, semakin tinggi jabatan seseorang semakin lama *fraud* dapat ditemukan.

Gambar 24 : Lama Pendeteksian *Fraud* Berdasarkan Posisi / Jabatan Pelaku

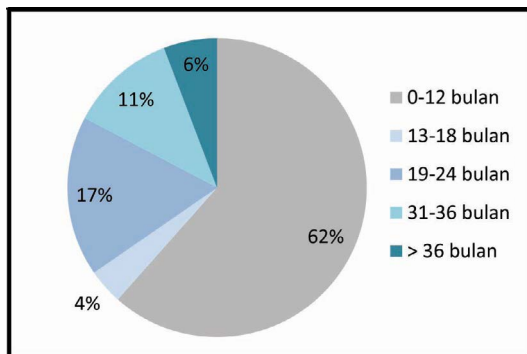


Sumber : data diolah, 2016.

Untuk memperjelas lama pendeteksian berdasarkan jenis posisi pelaku *fraud*, berikut kami sajikan *breakdown* untuk setiap posisi dan lama pendeteksian.

### Atasan

Gambar 25 : Lama Pendeteksian *Fraud* untuk posisi Atasan (direksi) / Pemilik

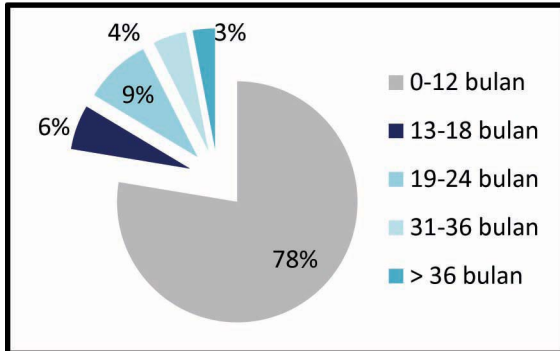


Berdasarkan hasil survai yang telah dilakukan, mayoritas *fraud* yang dilakukan oleh atasan (direksi)/pemilik membutuhkan waktu pendeteksian 0-12 bulan.

Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

## MANAJER

Gambar 26 : Lama Pendeteksian *Fraud* untuk posisi Manajer

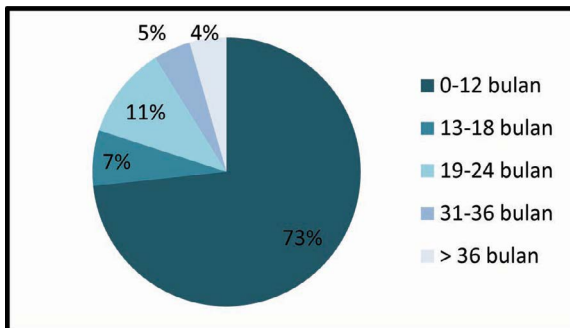


Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Berdasarkan hasil survai yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa lamanya pendeteksian *fraud* pada tingkat manajer adalah 0-12 bulan. Namun yang perlu diperhatikan adalah 22% kasus lainnya ditemukan lebih dari 12 bulan.

## KARYAWAN

Gambar 27 : Lama Pendeteksian *Fraud* untuk posisi Karyawan

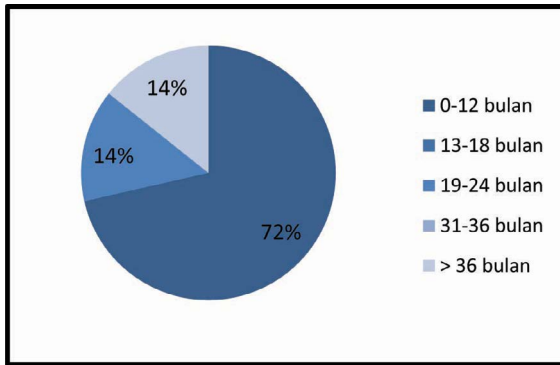


Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Hasil survai posisi karyawan nyatanya menunjukkan hasil pendeteksian yang lebih lama daripada posisi middle manager. Dengan kasus yang lebih sedikit ditemukan, namun pendeteksian *fraud* untuk posisi karyawan memiliki persentase lebih besar untuk rentang waktu di atas 12 bulan (27%) daripada posisi manajer (22%).

## PIHAK LAINNYA

Gambar 28 : Lama Pendeteksian *Fraud* untuk posisi Pihak Lainnya

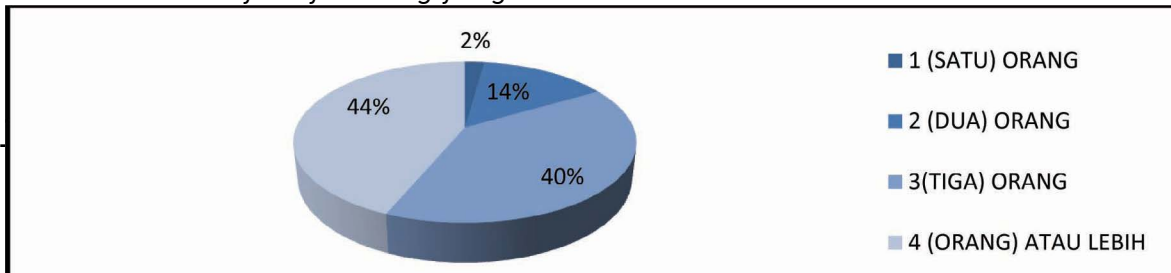


Dalam pengisian kuesioner, responden lebih banyak menyebut pihak lainnya ini sebagai pejabat pemerintah, rekanan, pihak ketiga, dan pemasok. Dengan kasus yang paling sedikit, namun lama pendeteksian untuk 1 kasus yang ditemukan dapat mencapai >36 bulan. Dalam survei ini, lama pendeteksian yang lebih dari 36 bulan mencapai 14%.

Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

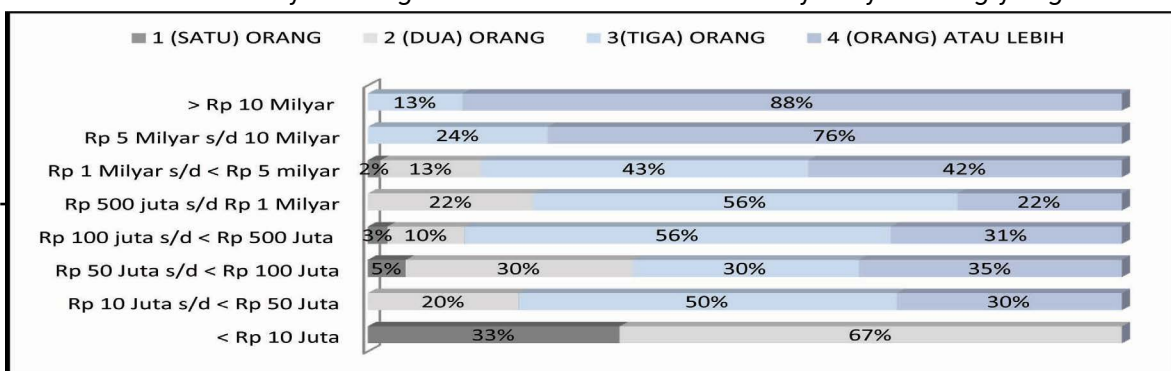
## Fraud secara kolusif

Gambar 29 : Banyaknya Orang yang Terlibat dalam *Fraud* Secara Kolusif



Sumber : data kuesioner, diolah (2016).

Gambar 30 : Besarnya Kerugian *Fraud* Berdasarkan Banyaknya Orang yang Terlibat

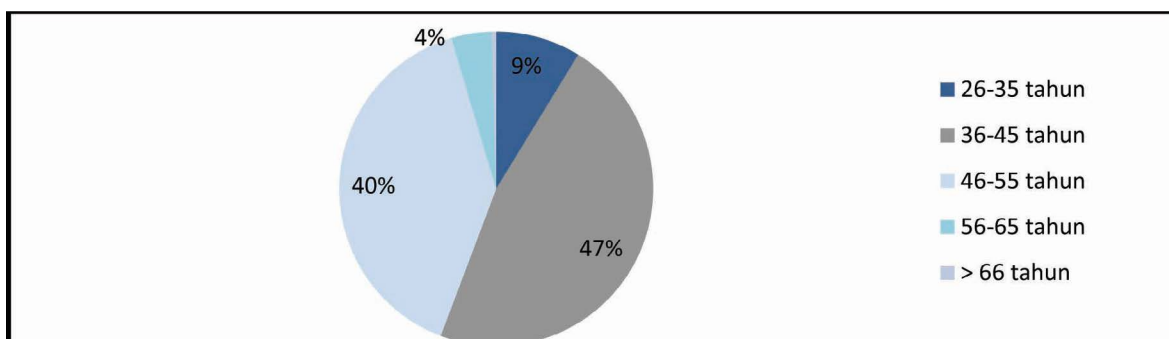


Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Dari gambaran di atas, tampak bahwa semakin banyak orang yang terlibat dalam fraud semakin banyak terjadinya *fraud* (44%). Hal ini tentunya berimplikasi bahwa semakin banyak orang yang terlibat dalam *fraud*, semakin banyak pula kerugian akibat *fraud*.

### Usia Rata-rata pelaku *fraud*

Gambar 31 : Usia Rata-rata Pelaku *Fraud*



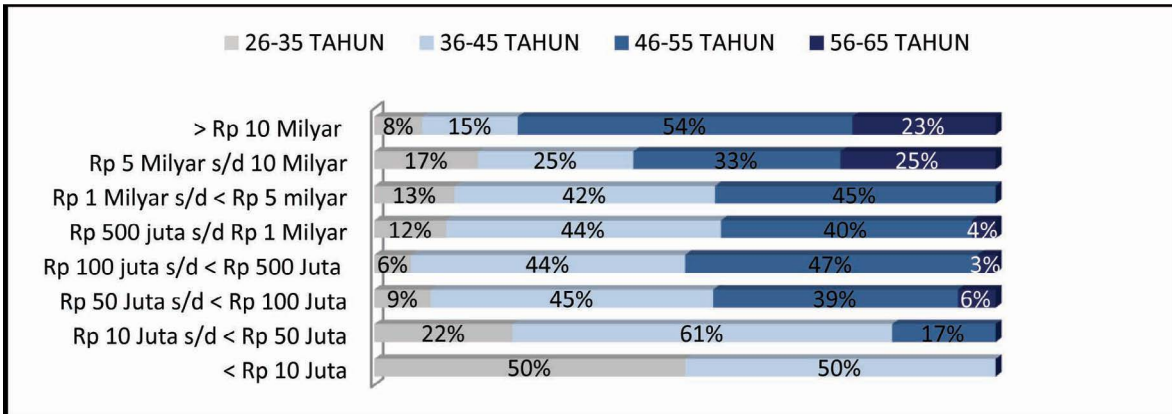
Sumber: data diolah, 2016

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa di Indonesia, rata-rata usia pelaku *fraud* yang paling banyak adalah usia 36-45 tahun (47%). Selanjutnya dilakukan oleh usia 46-55 tahun. Usia tersebut menunjukkan bahwa para pelaku *fraud* berada pada posisi yang sangat produktif serta lazimnya berada pada posisi puncak.

### Kerugian *Fraud* berdasarkan Usia Pelaku

Hasil survai menunjukkan tiga hal pada poin kerugian *fraud* berdasarkan usia pelaku. Pertama, kerugian paling banyak yang diakibatkan oleh *fraud* berada dalam rentang Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Hal ini terlihat dari 30 kasus atau (%) dilakukan oleh pelaku yang berusia 36-45. Sementara terdapat 32 kasus atau % dilakukan oleh pelaku berusia 46-55 tahun. Hal kedua yang dapat diperoleh dari survai ini juga menunjukkan bahwa dalam usia produktif, dalam hal ini 36-45 tahun yang diasumsikan menduduki puncak karir lebih banyak melakukan kasus *fraud*. Hal ketiga yang dapat diambil kesimpulan adalah pada usia 46-55 tahun yang mencapai kematangan, pelaku lebih cenderung berkurang. Namun, kejahatan pada level kerugian lebih dari Rp 10 milyar meningkat.

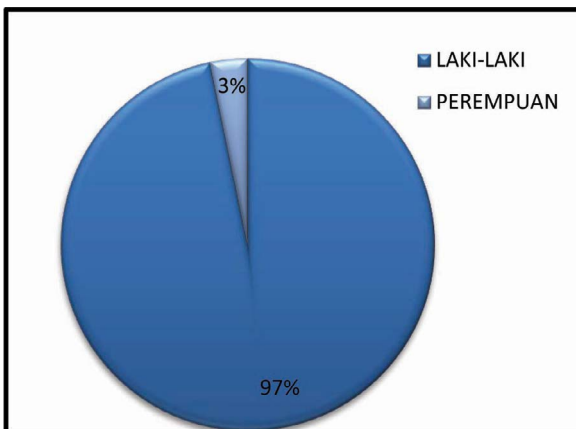
Gambar 32 : Kerugian *Fraud* berdasarkan Usia Pelaku



Sumber: data diolah, 2016

### Jenis Kelamin Pelaku *Fraud*

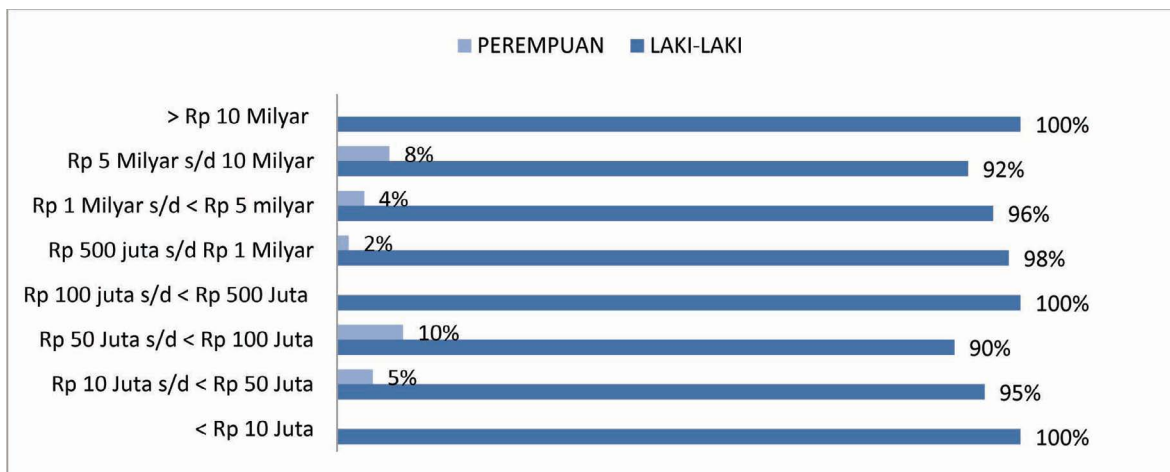
Gambar 33 : Jenis Kelamin Pelaku *Fraud*



Berbeda jauh dengan Report to The Nations (2016), yang menyatakan bahwa laki-laki merupakan 65% dari pelaku fraud, maka di Indonesia menurut pendapat responden pelaku fraud yang ber gender laki - laki mencapai 97%. Namun hal ini sejalan dengan data yang telah kami ambil dari Mahkamah Agung khusus korupsi yang menerangkan bahwa 92% pelaku fraud khususnya jenis korupsi adalah 92%.

## Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 34 : Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis Kelamin



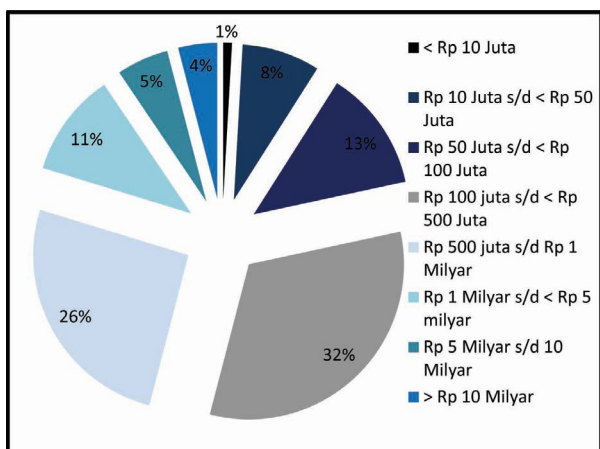
Sumber: data diolah, 2016

Dengan demikian secara logika, karena yang paling merugikan adalah laki-laki, maka kerugian akibat *fraud* pada tingkat berapapun sebagian besar adalah dilakukan oleh laki – laki.

## Break down Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis Kelamin

### Laki-laki

Gambar 35 : Kerugian akibat *Fraud* yang Dilakukan oleh laki-laki

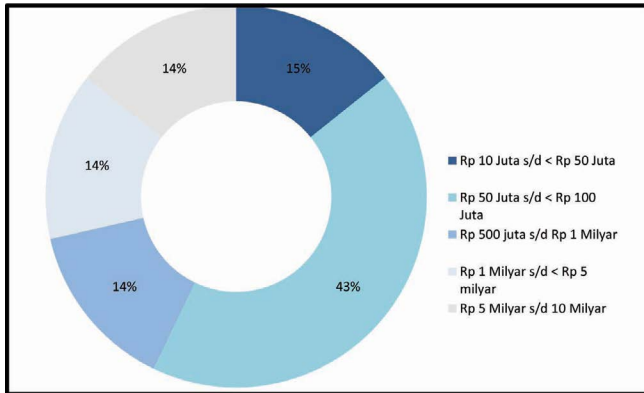


Berdasarkan data yang telah di-break down ini dapat dilihat bahwa nominal Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta menjadi jumlah terbanyak (32% atau 72 kasus) kerugian yang diakibatkan oleh pelaku *fraud* laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil survai yang menyebutkan bahwa angka kerugian akibat *fraud* berada dalam kisaran Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta.

Sumber: data diolah, 2016

## Perempuan

Gambar 36 : Kerugian akibat *Fraud* yang Dilakukan oleh Perempuan



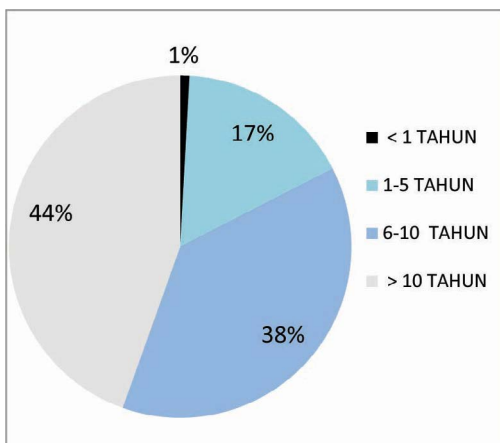
Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Angka kerugian yang lebih sedikit ditunjukkan oleh pelaku *fraud* perempuan. Kasus *fraud* yang melibatkan perempuan hanya berkisar Rp 50 juta sampai dengan < Rp 100 juta. Namun yang perlu menjadi catatan adalah persentase untuk jumlah kerugian lebih dari 1 milyar. Hal ini dibuktikan secara konstan perempuan dapat mengakibatkan kerugian dari range Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar sebanyak 14%.

## Masa Kerja Pelaku *Fraud*

Berdasarkan survai yang dilakukan, Data dan informasi tersebut menjelaskan bahwa sbagian besar pelaku *fraud* telah bekerja lebih dari 10 tahun (44%).

Gambar 37 : Masa Kerja Pelaku *Fraud*



Sumber: data diolah, 2016

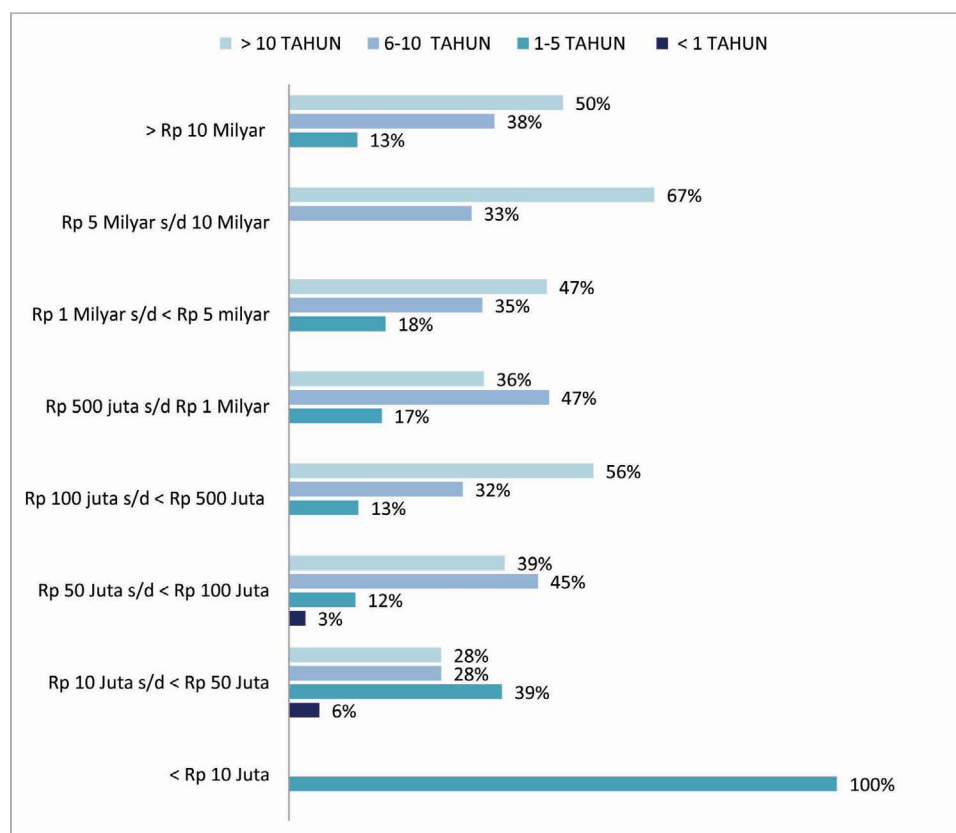
Berdasarkan grafik yang tersaji, dapat dilihat bahwa semakin lama masa kerja, maka akan semakin berpotensi dalam melakukan fraud. Hal ini disebabkan oleh pengalaman serta sudah diketahuinya celah untuk melakukan fraud.

## Kerugian Fraud berdasarkan masa kerja

Berdasarkan gambaran survai pada gambar 39, dapat dilihat bahwa masa kerja yang lebih lama cenderung mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena pekerja yang memiliki masa kerja yang lebih lama sudah mengetahui celah-celah yang dapat digunakan untuk melakukan *fraud*, di samping posisi yang diduduki. Masa kerja yang lebih lama cenderung membuat seorang pelaku *fraud* berada di posisi yang 'nyaman' untuk melakukan *fraud*. Masa kerja yang semakin lama pula dapat menyebabkan pelaku merasa punya pembenar atas apa yang dilakukan.

Segitiga *fraud* menyatakan ada tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, diantaranya: (1) Pressure , (2) Opportunity, (3) Rationalization. Para pelaku dengan masa kerja yang lebih lama bisa jadi merasa tidak melakukan *fraud* karena menganggap apa yang dilakukannya adalah timbal balik atas jasa atau lamanya pengabdian terhadap perusahaan. Sehingga menganggap hal yang dilakukannya adalah wajar.

Gambar 38 : Kerugian *Fraud* Berdasarkan Masa Kerja



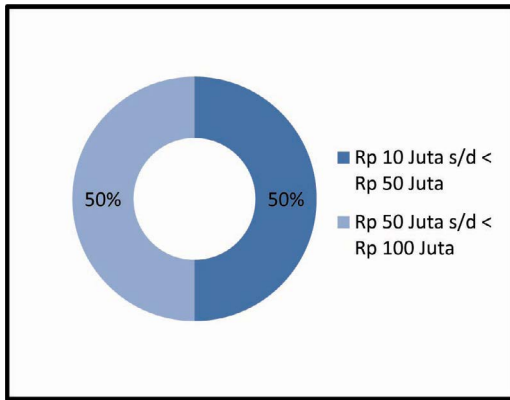
Sumber : data diolah, 2016



Agar lebih mendalami jumlah kerugian berdasarkan masa kerja, berikut ini kami sajikan *breakdown* untuk setiap range masa kerja beserta kerugian yang diakibatkan.

### Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Gambar 39 : Kerugian akibat *Fraud* yang diakibatkan oleh Pelaku dengan masa kerja kurang dari 1 tahun

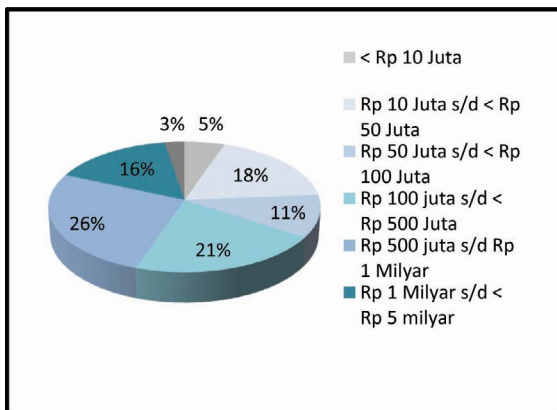


Sumber : data kuesioner, diolah

Hanya ada dua responden yang memiliki pengalaman menemukan *fraud* pada masa kerja kurang dari satu tahun. Jumlah yang diakibatkan pun maksimal Rp 100 juta. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian bahwa pada masa kerja kurang dari satu tahun, pelaku telah dapat mengakibatkan kerugian yang berdampak material terhadap keuangan perusahaan. Hal ini dapat diakibatkan kurangnya program asistensi perusahaan untuk karyawan baru dalam perusahaan.

### Masa Kerja 1-5 Tahun

Gambar 40 : Kerugian akibat *Fraud* yang diakibatkan oleh Pelaku dengan masa kerja 1-5 Tahun

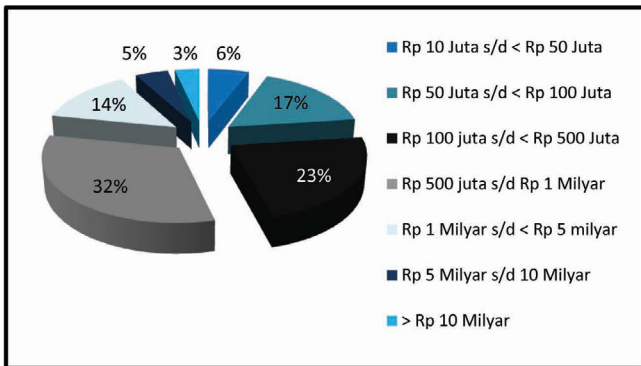


Sumber: data kuesioner, diolah (2016)

Naik satu tingkat dari masa kerja yang kurang dari satu tahun, tingkat kerugian paling banyak yang dilakukan oleh pelaku *fraud* juga ikut meningkat. Jika kerugian pada masa kerja kurang dari satu tahun hanya mencapai Rp 100 juta, maka untuk masa kerja 1-5 tahun ini kerugian terbanyak (26%) ada pada range Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar.

## Masa Kerja 6-10 Tahun

Gambar 41 : Kerugian akibat *Fraud* yang diakibatkan oleh Pelaku dengan masa kerja 6-10 tahun

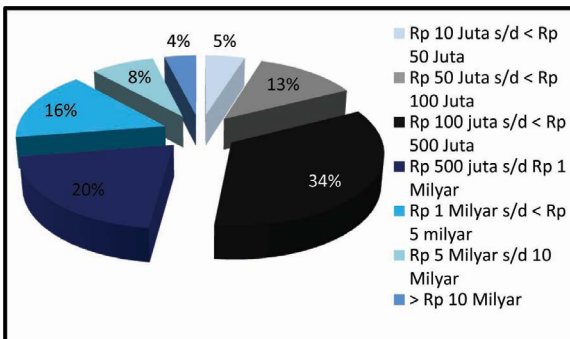


Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Berdasarkan gambar 38, dapat diketahui bahwa semakin lama masa kerja, maka semakin berpotensi melakukan *fraud*. Meski berada satu tingkat di atas masa kerja 1-5 tahun, namun range kerugian akibat terjadinya *fraud* tidak terlalu banyak perubahan, yaitu pada range Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar.

## Masa Kerja Lebih Dari 10 Tahun

Gambar 42 : Kerugian akibat *Fraud* yang diakibatkan oleh Pelaku dengan masa kerja lebih dari 10 tahun

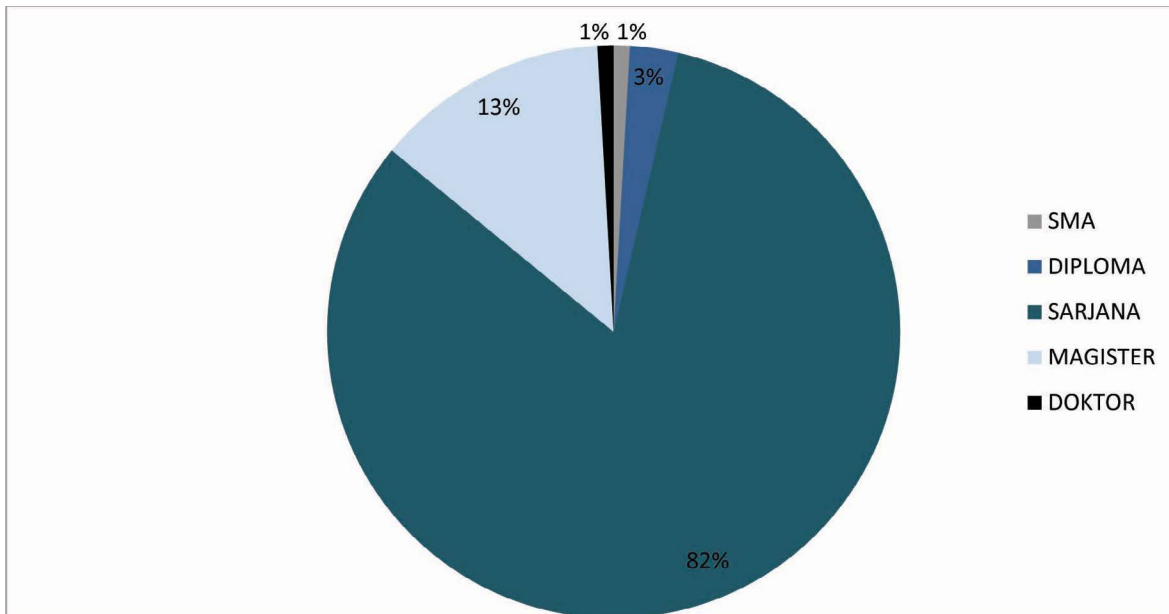


Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Masa kerja lebih dari 10 tahun, selain didapatkan kasus lebih banyak, pada jenjang ini juga ditemukan risiko kerugian lebih dari Rp 10 milyar yang juga lebih banyak daripada masa kelompok masa kerja yang lainnya.

## Pendidikan Pelaku *Fraud*

Gambar 43 : Pendidikan Pelaku *Fraud*

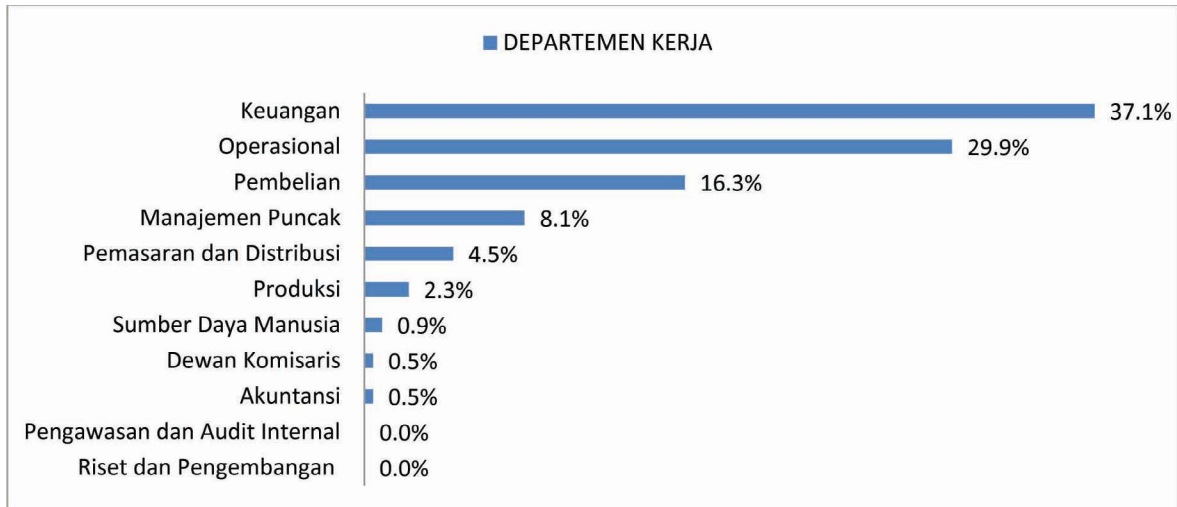


Sumber: data diolah, 2016

Sama dengan *Report to The Nationss* (2016), maka pendidikan pelaku *fraud* di Indonesia adalah sarjana ke atas. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana proses pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini merupakan pertanyaan besar yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Jawabannya memerlukan penelitian yang mendalam. Namun diduga bahwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, pendidikan tinggi lebih mengutamakan *hardskill* dibandingkan *softskill*. Di masa depan Indonesia perlu menekankan perlunya pendidikan tinggi yang mengutamakan proses kejujuran, integritas, dan lainnya, dibandingkan pendidikan tinggi yang hanya menekankan pada keahlian. ACFE Indonesia Chapter dapat berperan dalam hal ini.

## Bagian Tempat Pelaku *Fraud* Bekerja

Gambar 44 : Bagian Tempat Pelaku *Fraud* Bekerja



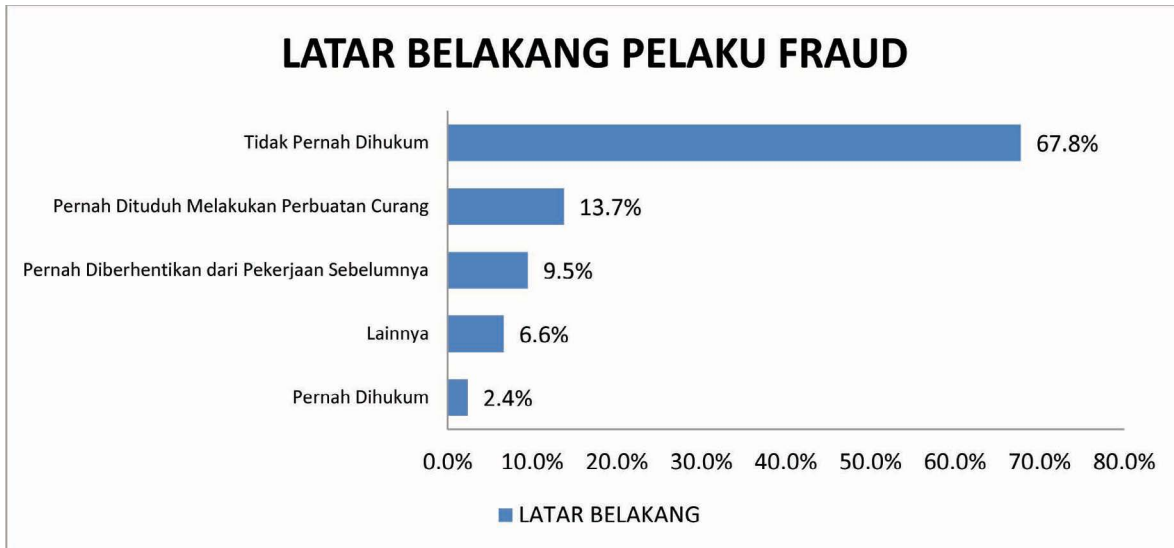
Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, tiga departemen teratas yang menjadi 'sarang' terjadinya *fraud* adalah Keuangan (37.1% atau dipilih oleh 88 responden), Operasional (29.9% atau dipilih oleh 66 responden), dan Pembelian (16.3% atau 36 responden).

Dari data dan informasi tersebut di atas, tergambar bahwa departemen atau bagian keuangan merupakan tempat utama terjadinya *fraud* (37.1%). Hal ini wajar, karena departemen atau bagian keuangan merupakan sumber dana yang sering kali menjadi motivasi atau tekanan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*, apalagi bila peluangnya tinggi.

## Latar Belakang Pelaku *Fraud*

Gambar 45 : Latar Belakang Pelaku *Fraud*

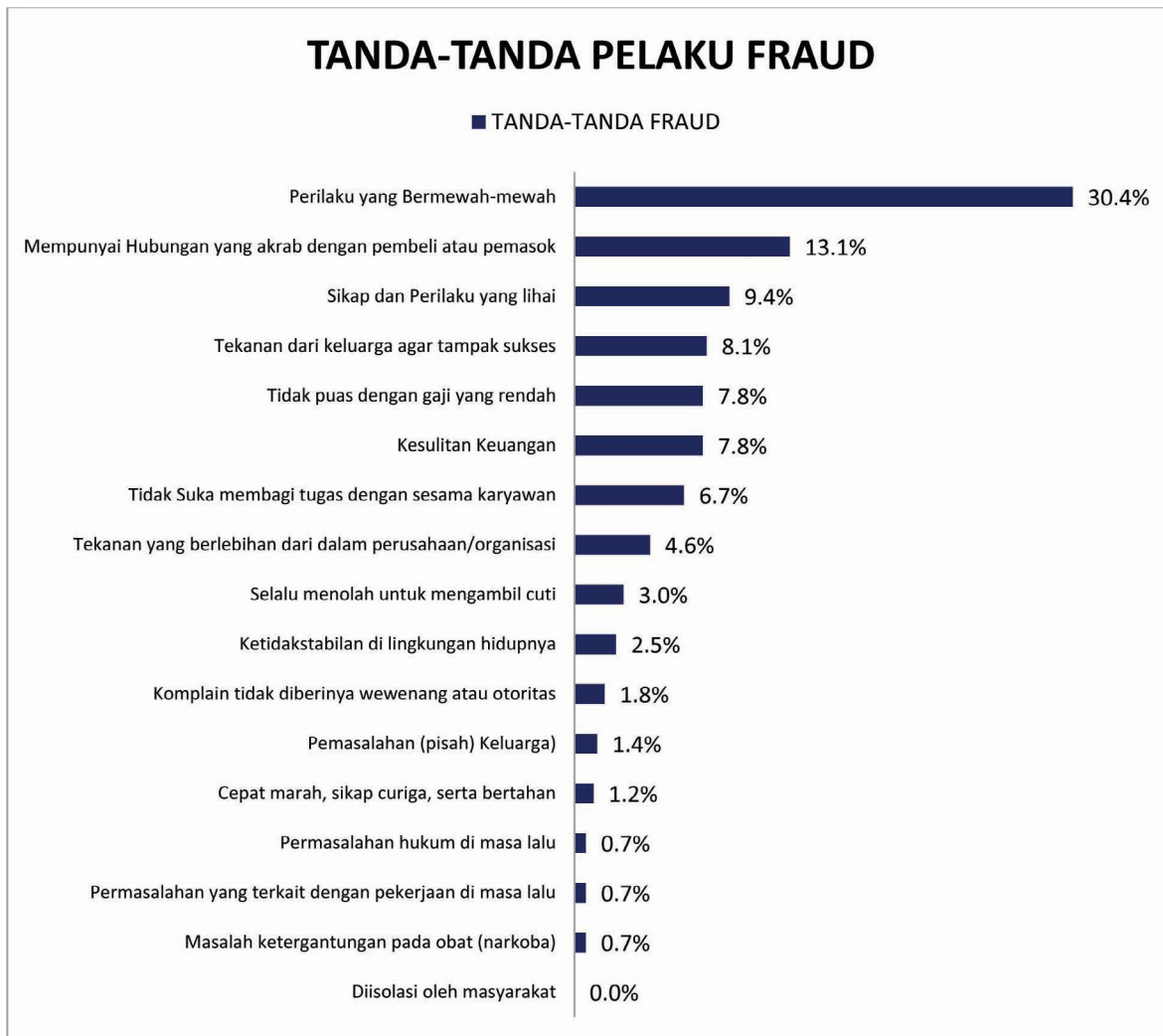


Sumber: data diolah, 2016

Hasil survai ini sama dengan hasil RTTN (2016), yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku *fraud* belum pernah dihukum.

## Tanda-tanda Perilaku *Fraud*

Gambar 46 : Tanda-tanda Perilaku *Fraud*



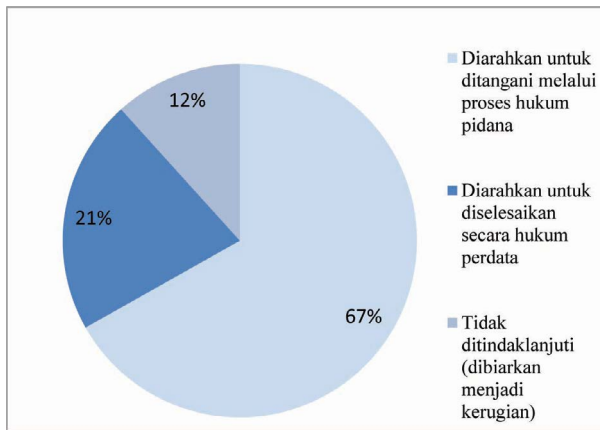
Sumber: data diolah, 2016

Data dan informasi tersebut di atas menggambarkan bahwa tanda-tanda dari pelaku *fraud* tercermin dari perilaku mereka yang senang bermewah mewah atau lazim diungkapkan dengan sikap *extravaganza lifestyle* (30.4%). Tanda-tanda ini tampaknya berlaku di seluruh dunia, karena tanda-tanda ini sama dengan apa yang tergambar pada *Report to The Nations* (2016).

## Penyelesaian Tindak *Fraud*

### Penyelesaian *Fraud*

Gambar 47: Proses Penyelesaian *Fraud*



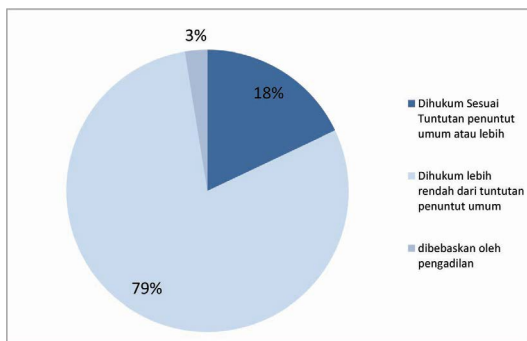
informasi tersebut menjelaskan bahwa 67% atau 143 responden berpendapat bahwa penyelesaian *fraud* dilakukan melalui proses hukum pidana. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK yang menghukum pidana setiap pihak yang terbukti melakukan tindak *fraud* khususnya korupsi. Namun, agaknya perlu dipertegas untuk penyelesaian tindak pidana guna menekan angka terjadinya *fraud* yang ada di Indonesia.

Sumber: data diolah, 2016

Hal tersebut didukung oleh data sekunder yang berasal dari putusan MA, yang menunjukkan banyaknya kasus yang diproses oleh Mahkamah Agung adalah 2520 (dapat dilihat pada halaman 44)

### Hukuman terhadap Pelaku *Fraud*

Gambar 48 : Hukuman terhadap Pelaku *Fraud*



Informasi tersebut di atas menggambarkan bahwa di Indonesia hukuman terhadap pelaku *fraud* dihukum lebih rendah dibandingkan tuntutan dari penuntut umum. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas atau diturunkan peringkatnya.

Sumber : data diolah, 2016.

# Informasi Pelaku Korupsi Indonesia 2016

Informasi pelaku korupsi di Indonesia, 2016 adalah gambaran atau profil koruptor di Indonesia yang datanya diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) selama tahun 2003 sampai dengan Mei 2016. Jumlah data MA selama periode tersebut adalah 2520 informasi putusan. Dikarenakan terdapat putusan yang tidak dapat diunduh (1039 putusan) serta terdapat data yang tidak dapat dikualifikasi dan ganda (36 putusan), maka putusan yang valid yang dapat digunakan menggambarkan informasi pelaku korupsi di Indonesia, 2016 sebanyak 1445 putusan. Adapun total kerugian langsung akibat korupsi berdasarkan data dari MA tersebut adalah Rp. 17.808.972.136.738,-

Tabel 3

<b>Jumlah data Direktori Putusan Mahkamah Agung (2003-Mei 2016)</b>	<b>2520</b>	<b>100%</b>
<b>1</b> Yang tidak dapat diunduh/diakses	(1039)	41,2%
<b>2</b> Data yang tidak dapat diklasifikasi		
a. data yang tidak dapat diklasifikasi dan ganda	(36)	1,4%
<b>3</b> Jumlah data yang terpakai untuk penelitian	1445	57,4%

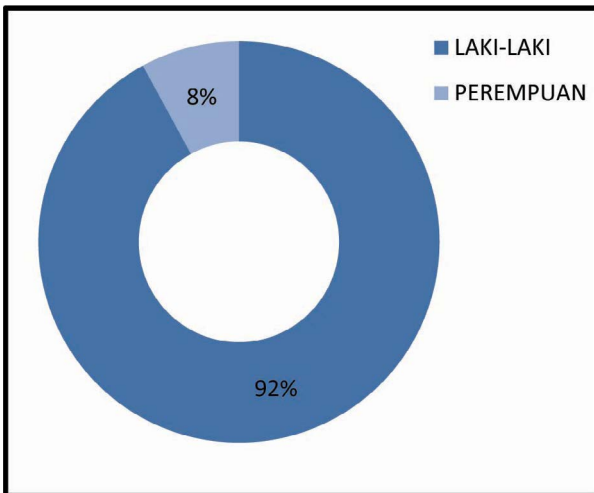
**TOTAL KERUGIAN AKIBAT KORUPSI :**

**17,808,972,136,738**



## Jenis kelamin pelaku korupsi

Gambar 49 : Jenis Kelamin Pelaku Korupsi

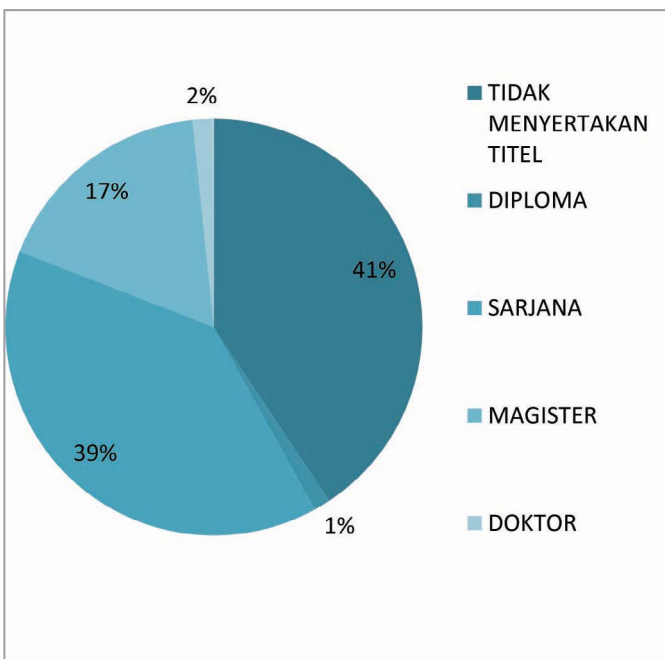


Data dan informasi ini mendukung data profil *fraud* di Indonesia tahun 2016 yang didapatkan yang menyatakan bahwa 97% pelaku *fraud* di Indonesia adalah laki-laki. Pada data MA sebanyak 92% pelaku atau 1721 pelaku korupsi adalah laki-laki. Sementara sisanya, 8% atau 150 orang, adalah perempuan.

Sumber: data diolah, 2016.

## Pendidikan terakhir pelaku korupsi

Gambar 50 : Pendidikan terakhir pelaku Korupsi



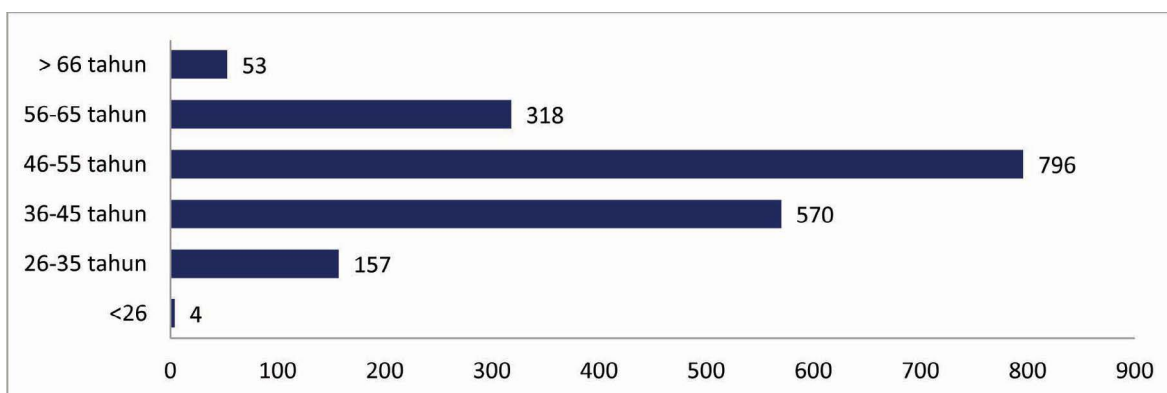
Sebagian besar pelaku memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 50 yang menyatakan pelaku korupsi berlatar belakang berpendidikan sarjana (39%) atau lebih tinggi, seperti magister (17%) dan doktor (2%).

Sumber : data diolah, 2016.

## Usia pelaku korupsi

Ada perbedaan antara hasil survai dengan data yang diambil dari MA. Survai yang dilakukan menunjukkan bahwa usia 36-45 tahun lah yang mendominasi kejahatan fraud saat ini karena sedang dalam usia produktif. Namun, data MA menunjukkan sebanyak 796 kasus atau .42% dari keseluruhan merupakan usia yang sudah matang dalam pekerjaan. Sehingga hal ini mengindikasikan adanya perubahan kecenderungan usia dalam fraud. Di mana saat ini usia produktif lebih cakap dalam melakukan *fraud* karena tuntutan sosial maupun ambisi pribadi.

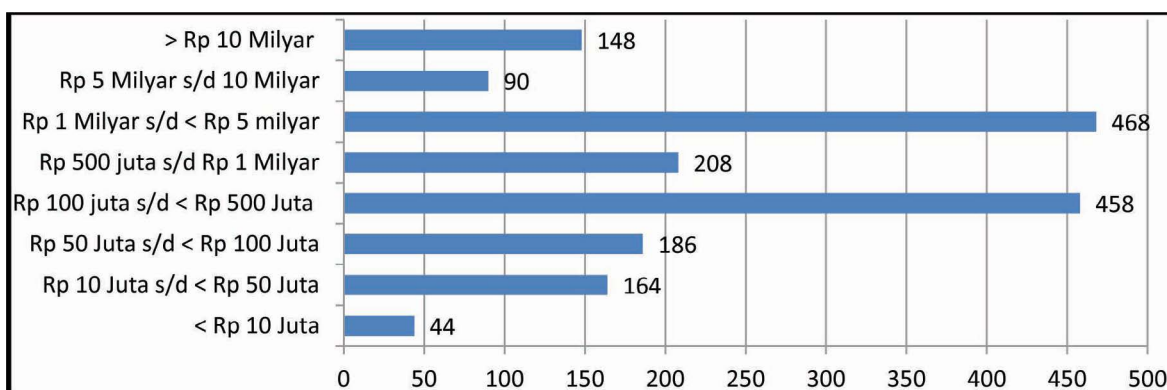
Gambar 51 : Usia Pelaku Korupsi



Sumber: data diolah 2016.

## Kerugian Akibat Korupsi

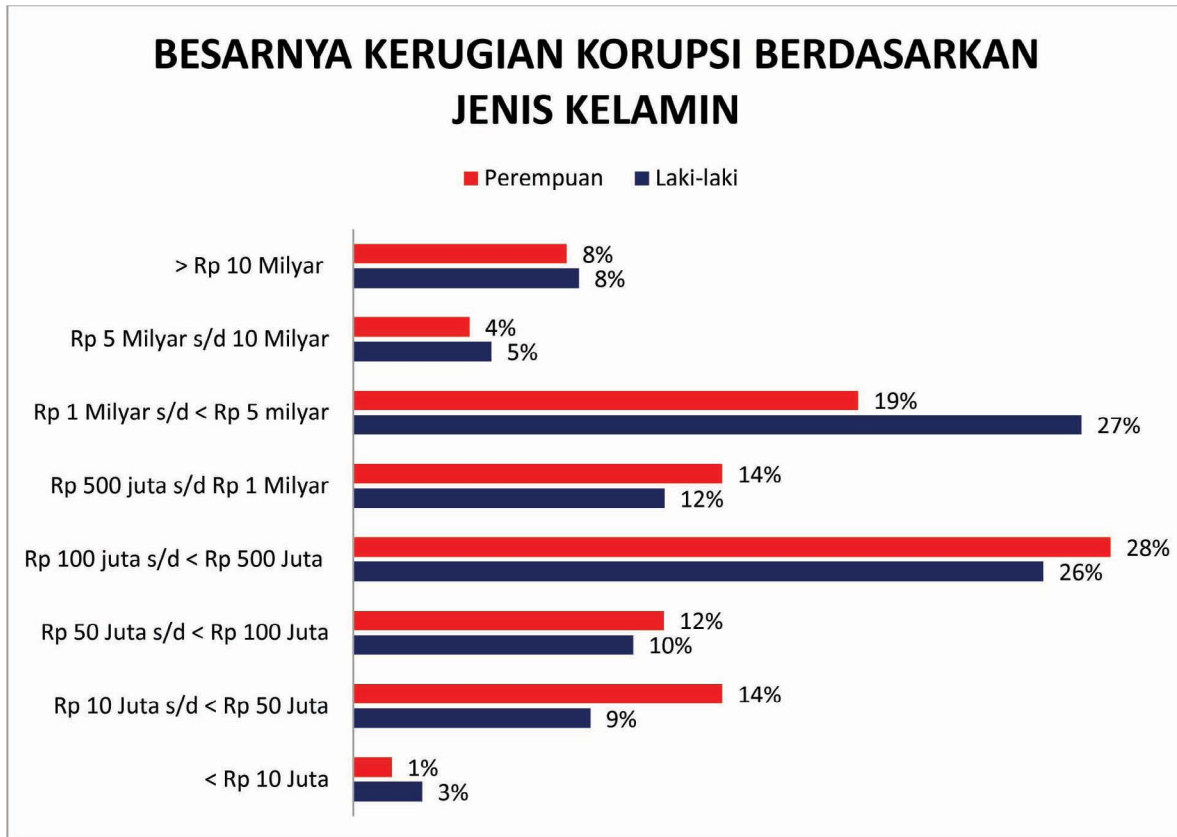
Gambar 52: Kerugian Akibat Korupsi



Sumber : data diolah, 2016

## Kerugian korupsi berdasarkan jenis kelamin

Gambar 53: Kerugian akibat korupsi berdasarkan tingkat pendidikan



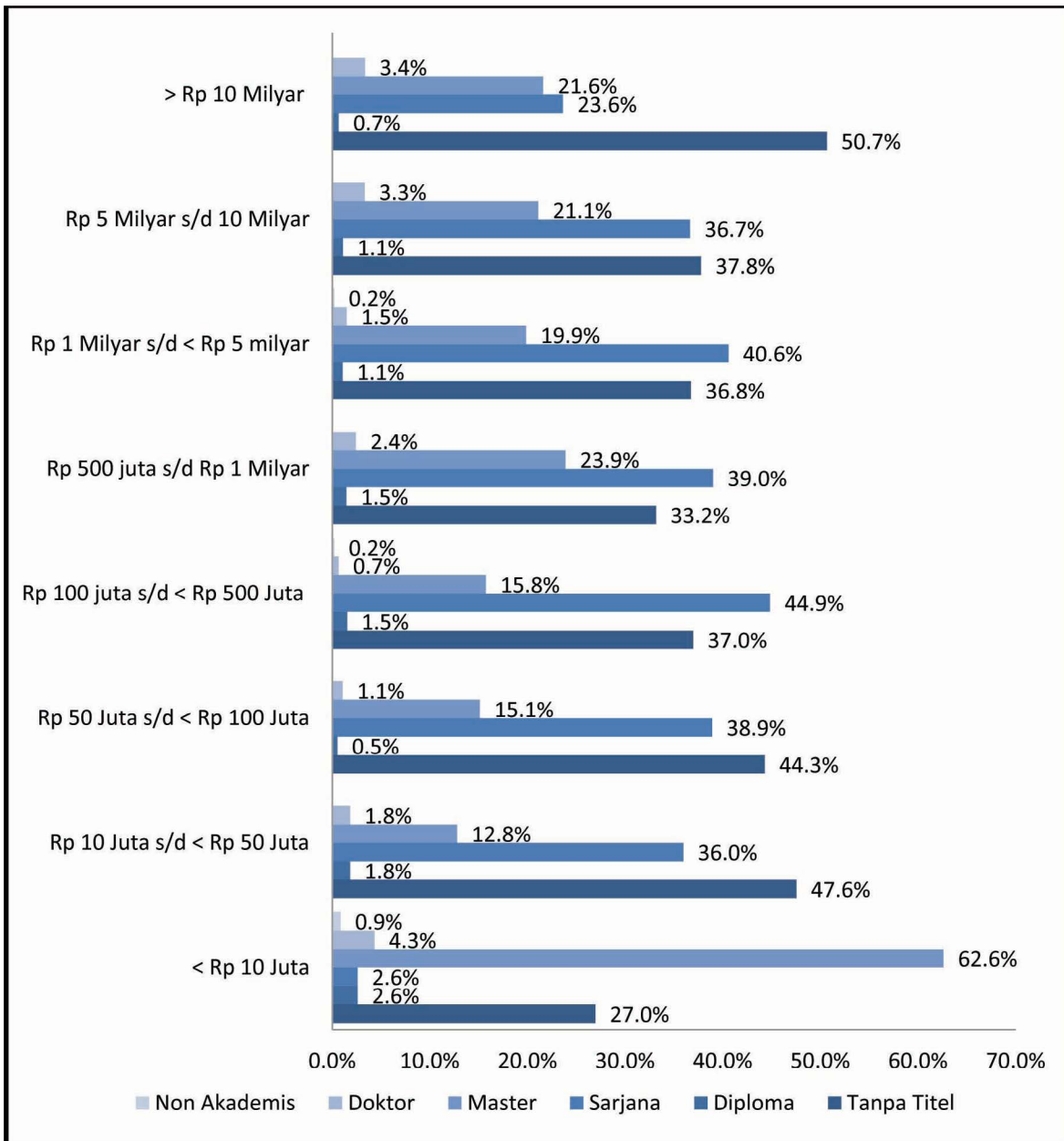
Sumber : data diolah, 2016

Meski sebagian besar pelaku korupsi adalah laki-laki, namun kerugian dari setiap kasus yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan relatif tidak berbeda. Hal ini menggambarkan bahwa di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan pelaku korupsi sama-sama merugikan masyarakat dan negara.

## Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran data dan informasi kerugian akibat korupsi berdasarkan tingkat pendidikan dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kerugian korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan sarjana ke atas jauh lebih besar dibandingkan kerugian oleh pelaku korupsi yang hanya di bawah sarjana.

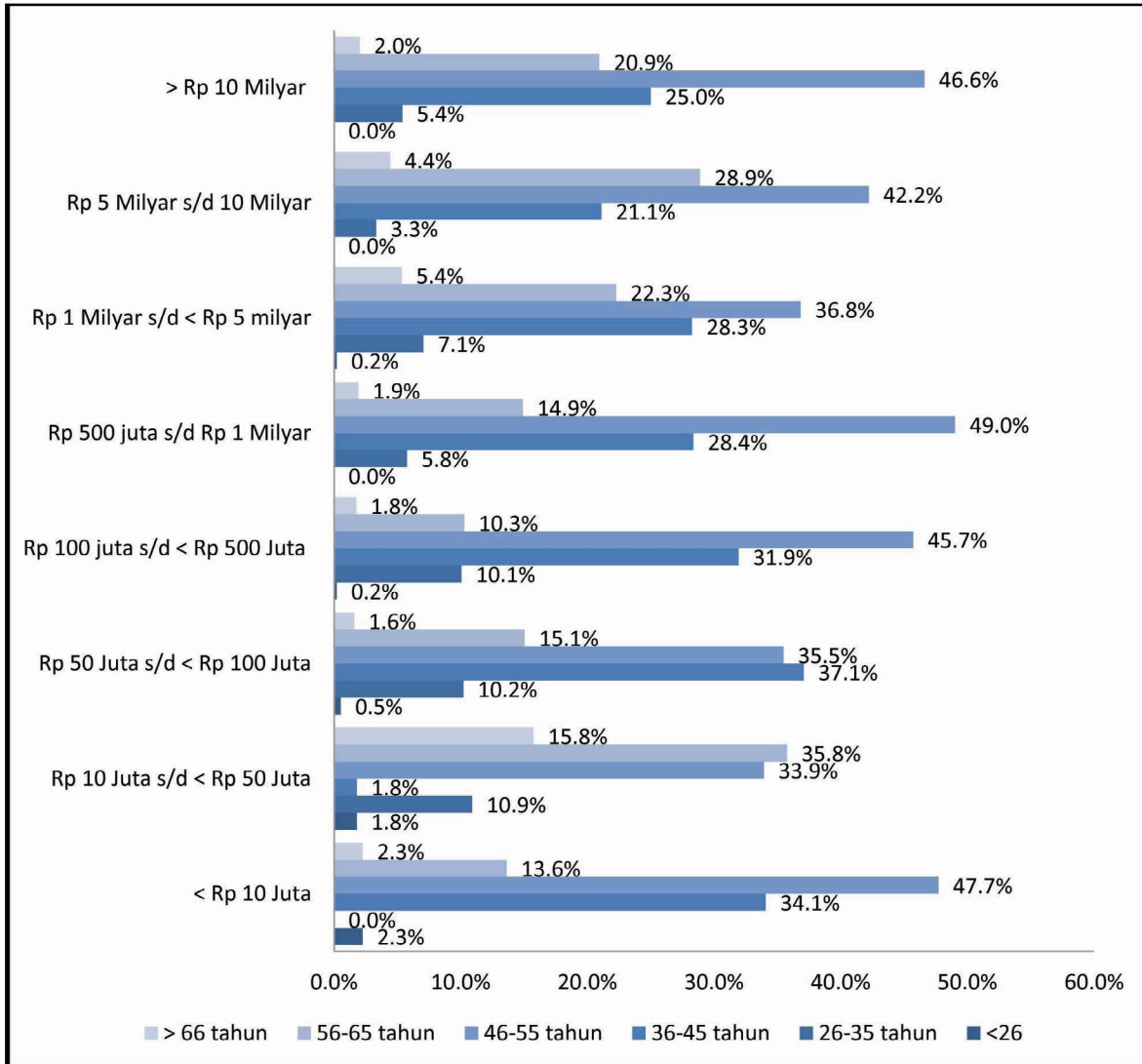
Gambar 54 : Kerugian akibat korupsi berdasarkan tingkat pendidikan



Sumber: data diolah, 2016

## Kerugian Korupsi Berdasarkan Usia

Gambar 55 : Kerugian Korupsi Berdasarkan Usia



Sumber : data diolah, 2016.

Mendukung data profil pelaku fraud di Indonesia, 2016, maka berdasarkan usia pelaku korupsi di Indonesia adalah pada usia di antara 36-45 tahun dan 46-55 tahun dengan nilai kerugian paling banyak berada pada range Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta.

# Demografi

Kotler (2016 : 96) mendefinisikan demografi sebagai berikut :

*“Demography is the study of human populations in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation, and other statistics.”*

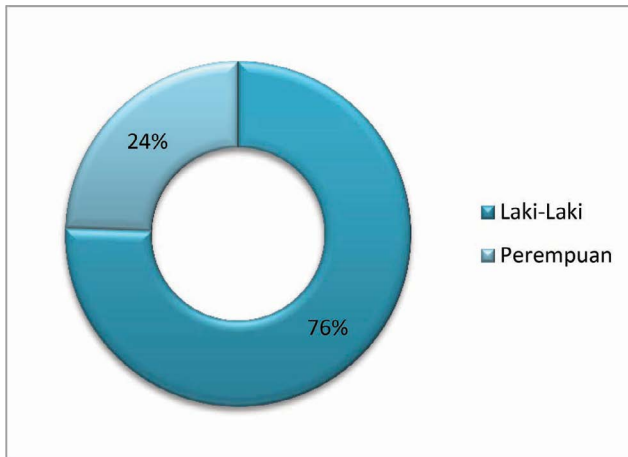
Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa demografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kependudukan. Hal-hal berkaitan dengan kependudukan yang masuk dalam demografi meliputi kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan data lainnya.

Demografi dalam penelitian ini mengambil aspek jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, jabatan/posisi responden dalam pekerjaannya baik di perusahaan maupun dalam instansi pemerintahan, serta lama bekerja.

Analisis demografi yang dilakukan ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan selama proses survai sebagai informasi pendukung tentang masing-masing responden. Jumlah data yang terkumpul dalam survai ini sebanyak 229 kuesioner.

## GENDER

Gambar 56 : Gender Responden

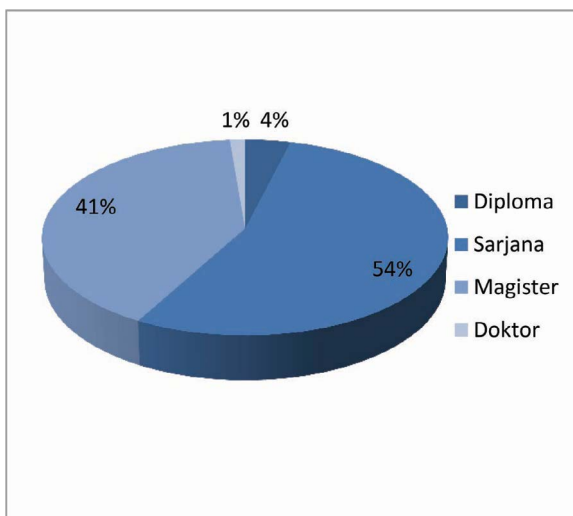


Pada bagian awal dalam pengisian survai fraud Indonesia 2016, kami meminta responden untuk mengisi identitas berupa gender. Hasilnya adalah sebanyak 76% atau 173 responden adalah laki-laki. Sementara sisanya sebanyak 24% atau 56 responden adalah perempuan.

sumber : data kuesioner, diolah (2016)

## PENDIDIKAN

Gambar 57 : Latar Belakang Pendidikan Responden

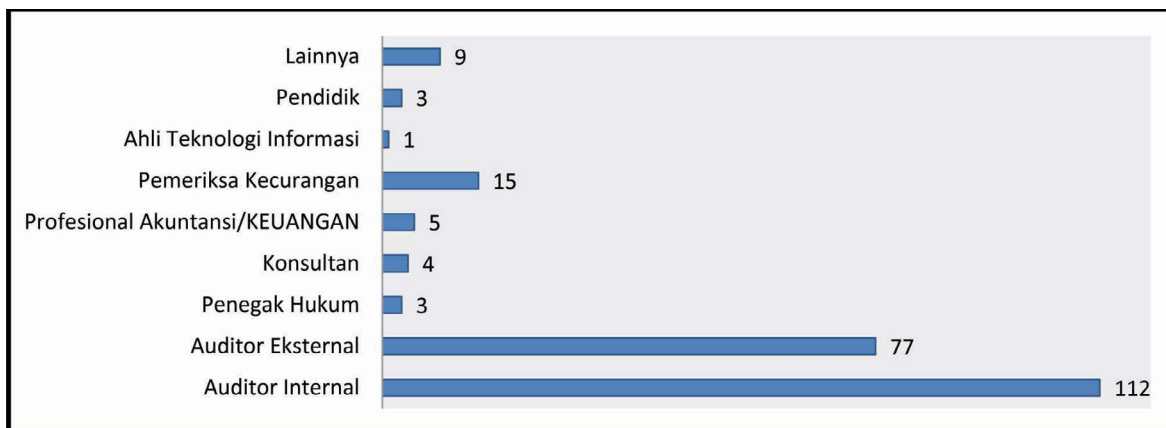


Berdasarkan survai yang telah dilakukan terhadap keseluruhan responden, didapatkan hasil bahwa mayoritas responden 54% atau sebanyak 124 responden merupakan lulusan sarjana. Sedangkan 41% atau 93 responden lainnya merupakan lulusan pasca sarjana. Sementara 5% sisanya terdiri atas 4% (9 orang) lulusan diploma dan 1% (3 orang) berlatar pendidikan terakhir doktor.

Sumber: data kuesioner, diolah (2016)

## PEKERJAAN

Gambar 58 : Pekerjaan Responden

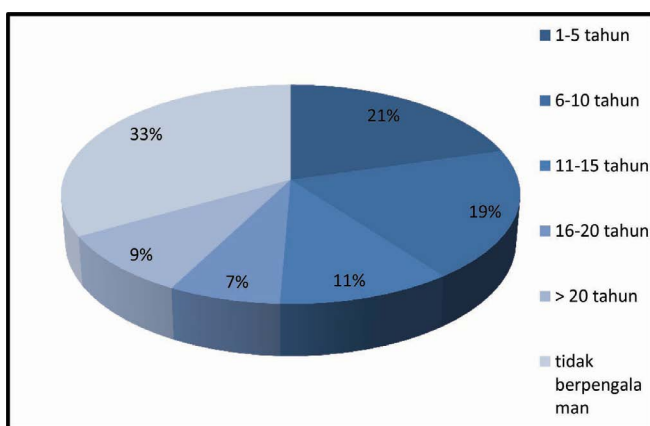


Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Data demografi selanjutnya yang kami minta responden untuk mengisi adalah pekerjaan. Sebanyak 112 orang atau 49% responden Survei *Fraud* Indonesia 2016 adalah auditor internal. Sementara 77 orang atau 33% responden berprofesi sebagai auditor eksternal. Profesi-profesi responden yang terlibat dalam Survei *Fraud* Indonesia 2016 ini antara lain pemeriksa *fraud* (7%), penegak hukum (1%), konsultan (2%), profesional akuntansi/keuangan (2%), ahli teknologi informasi (1%), dan pegawai BUMN serta *compliance* (4%).

## PENGALAMAN DI PROFESI ANTI FRAUD

Gambar 59 : Pengalaman Responden di Profesi Anti *Fraud*

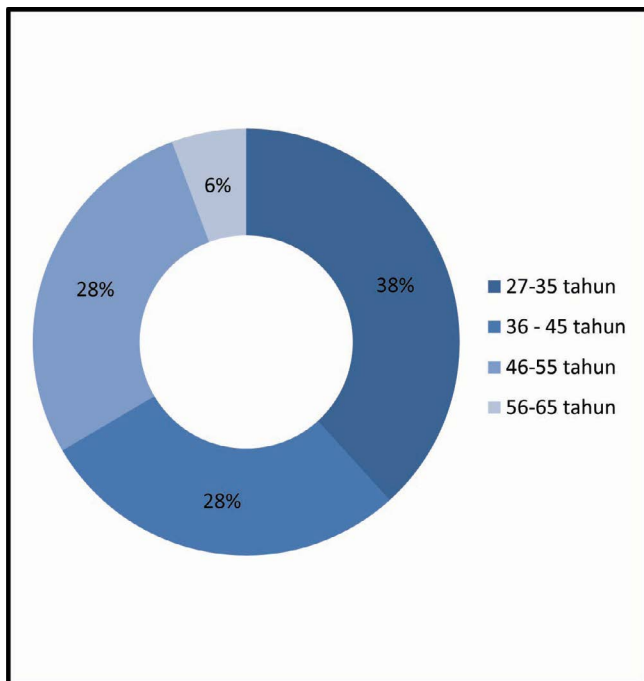


Berdasarkan informasi responden yang berpengalaman dalam menangani *fraud* adalah mayoritas 67%. Sedangkan sisanya (33%) belum berpengalaman menangani *fraud*. Sehingga jawabannya merupakan persepsi. Mayoritas pengalaman responden berada pada kisaran 1-5 tahun.



## USIA

Gambar 60: Usia Responden



Sumber : data kuesioner, diolah (2016)

Data demografi yang lain adalah usia responden. Berdasarkan kuesioner yang terkumpul, sebanyak 38% atau 88 responden berusia 27-35 tahun. Sementara sebanyak 28% responden berusia 36-45 tahun serta 46-55 tahun yang merupakan usia matang dalam dunia keprofesian.

## PEKERJAAN RESPONDEN

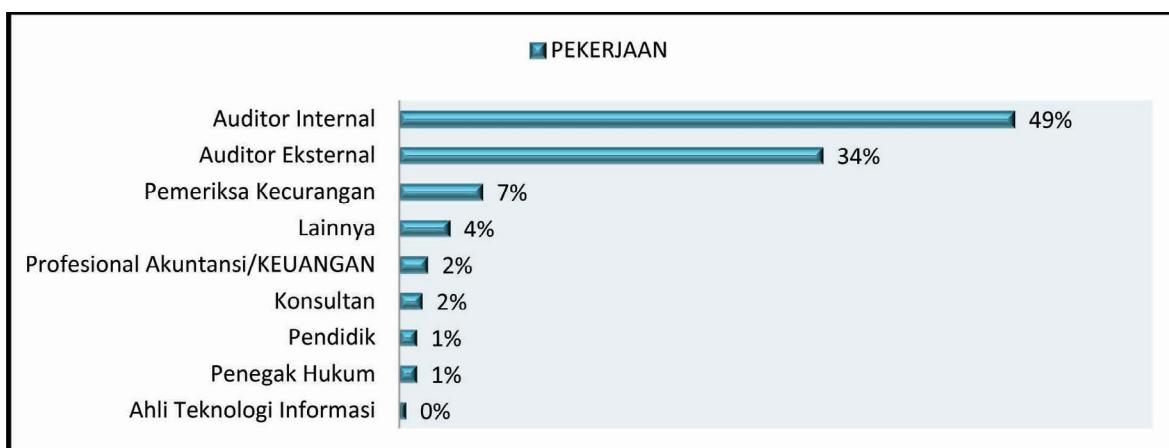
Berdasarkan data kuesioner yang telah diolah, informasi demografi yang dapat diperoleh untuk posisi responden dalam lembaga pemerintahan adalah mayoritas sebagai Auditor (81%). Posisi lain untuk poin ini adalah responden saat ini bekerja dengan posisi sebagai fungsional, administrasi, Inspekturat Jenderal, Auditorat Utama, Keuangan, Penegak hukum, dan tenaga ahli. Adapun sebanyak 4% dari responden memiliki posisi lainnya yang tidak termasuk dalam pilihan diantaranya investigator internal, analis, serta kepala perwakilan.

Gambar 61 : Jenis/Lingkup Pekerjaan Responden yang Bekerja di Lembaga Pemerintah



Sumber: data diolah, 2016

Gambar 62 : Jenis/Lingkup Pekerjaan Responden di Perusahaan

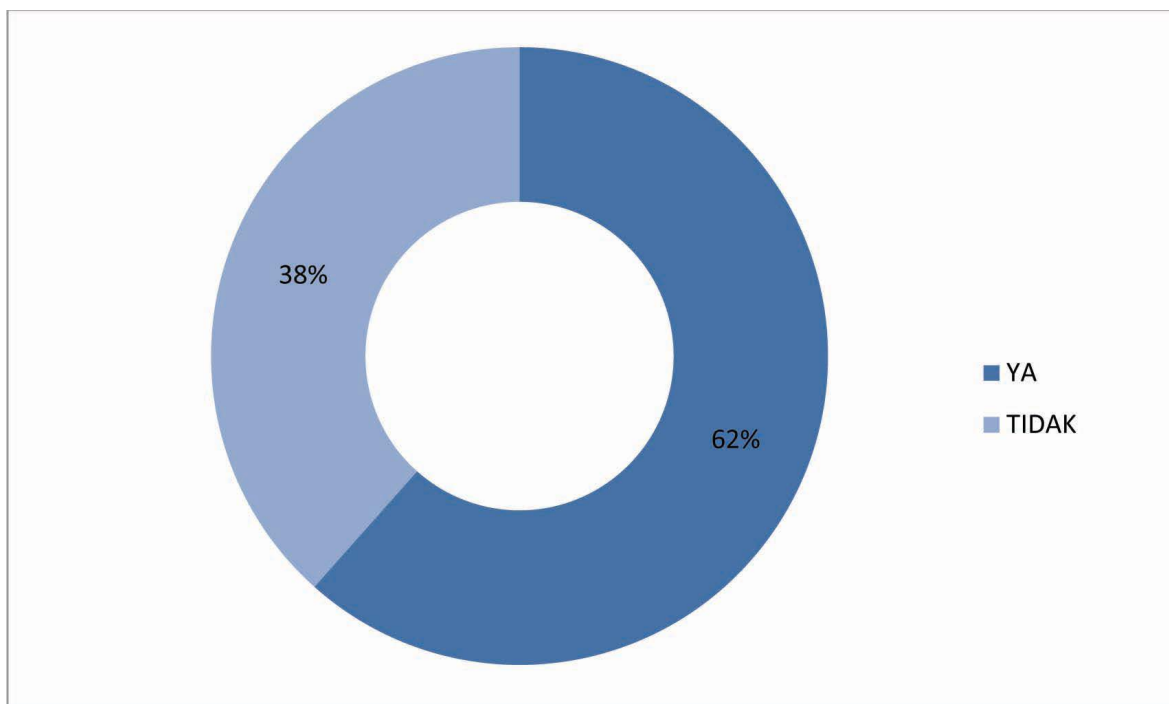


Sumber: Data kuesioner, diolah (2016)

Sesuai dengan sasaran utama survai ini, bahwa mayoritas responden berprofesi sebagai auditor internal (49%). Kemudian sebanyak 34% atau 77 responden berprofesi sebagai auditor eksternal. Dan 7% atau sebanyak 15 responden berprofesi sebagai pemeriksa *fraud*.

## PENGALAMAN RESPONDEN TERHADAP FRAUD

Dari 229 responden yang menjadi sumber informasi, gambaran tentang pengalaman menangani *fraud* adalah sebagai berikut;

Gambar 63 : Pengalaman Responden Menangani *Fraud*

Sumber: data diolah, 2016

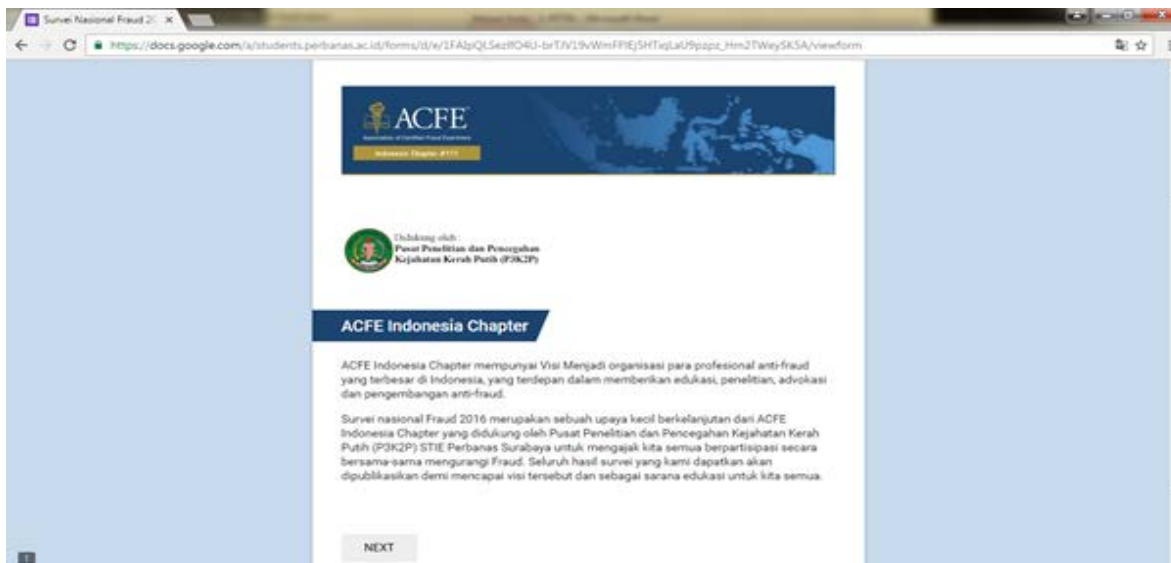
Berdasarkan survai yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter, sebanyak 141 responden atau 62% dari responden keseluruhan (229) memiliki pengalaman menangani *fraud*. Sementara sisanya, 38% atau 88 responden, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengalaman menangani *fraud*. Banyaknya responden yang tidak memiliki pengalaman di menangani *fraud* berasal dari kalangan auditor eksternal. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pelatihan serta pengetahuan mengenai *fraud* yang diketahui oleh auditor eksternal yang selama ini lebih fokus pada laporan keuangan serta yang ditangani adalah perusahaan swasta, yang artinya kerugian akibat korupsi di perusahaan itu dapat diselesaikan secara “kekeluargaan” dan tidak merugikan negara secara langsung.

# Metodologi

Survei *Fraud* di Indonesia (SFI) 2016 adalah survei yang menggambarkan tentang *fraud* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016. SFI 2016 adalah milik dan hak dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia Chapter. Perolehan data SFI 2016 dilakukan dan dibantu oleh Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya.

Sumber data SFI 2016 merupakan data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada pemegang sertifikasi CFE maupun anggota ACFE Indonesia Chapter. Penyebaran kuesioner melalui 2 (dua) media, yaitu secara *online* menggunakan *google form*. Tampilan awal seperti disajikan pada gambar 67 berikut.

Gambar 64 : Tampilan awal kuesioner Survei *Fraud* Indonesia 2016 secara *online*



Sumber : [bit.ly/RTTNversiIndonesia](http://bit.ly/RTTNversiIndonesia)

Media lain adalah kuesioner dalam bentuk tercetak, yang dibagikan kepada anggota ACFE, auditor, maupun praktisi yang mengikuti kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) yang dilaksanakan di Jakarta. Periode pengumpulan data dilakukan mulai bulan Juni hingga September tahun 2016.

SFI 2016 ini, juga melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) mulai tahun 2003 sampai dengan bulan Mei tahun 2016. Dari sumber tersebut, diketahui jumlah kasus yang ditangani oleh MA, tuntutan yang ditindak lanjuti atau tidak, besarnya hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau tidak, serta profil pelaku korupsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan metode pengumpulan data yang telah diuraikan tersebut, maka jumlah data yang diperoleh dan data yang dapat diolah adalah sebagai berikut:

1. Data profil *fraud* di Indonesia

Kuesioner yang terkumpul adalah dua ratus tiga puluh satu (231) eksemplar. Dari total kuesioner tersebut yang lengkap dijawab oleh responden dan dapat diolah sebanyak dua ratus dua puluh sembilan (229). Untuk selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel lalu dideskripsikan menjadi informasi data profil *fraud* di Indonesia 2016.

2. Informasi Pelaku Korupsi di Indonesia

Jumlah data MA selama tahun 2003 hingga 2016 (bulan Mei) adalah dua ribu lima ratus dua puluh (2.520) informasi putusan. Dikarenakan terdapat putusan yang tidak dapat diunduh (1.039 putusan) serta terdapat data yang tidak dapat dikualifikasi dan mengandung informasi berulang atau ganda (36 putusan), maka putusan yang dapat dioleh kemudian digunakan dalam menggambarkan informasi pelaku korupsi di Indonesia sebanyak 1.445 putusan.

Pada SFI 2016 ini juga dilengkapi dengan pendeskripsian data demografi responden. Aspek-aspek ini terdiri atas jenis kelamin (*gender*), pendidikan, pekerjaan, pengalaman responden di bidang *fraud*. Selain itu, disajikan juga data yang menjelaskan tentang usia, jabatan atau posisi serta pengalaman dari para responden dalam keterlibatan penanganan *fraud*.

# Tentang ACFE Indonesia Chapter

**A**CFE Indonesia Chapter merupakan organisasi nirlaba (non profit) yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat dengan cara memperbaiki tata cara pencegahan dan pemberantasan fraud, serta menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para anggota. ACFE Indonesia Chapter dibentuk pada tahun 2002. Peraturan di ACFE mengenai pembentukan sebuah chapter mewajibkan adanya petisi yang didukung oleh setidaknya 10 (sepuluh) CFE di Indonesia.

## Keanggotaan

Ada 3 (tiga) jenis keanggotaan ACFE Indonesia Chapter, yaitu:

1. Certified Fraud Examiners (CFE) Member  
Keanggotaan ini merupakan keanggotaan di ACFE Global dan diberikan kepada anggota yang sudah lulus ujian sertifikasi CFE.
2. Associate Member  
Bagi yang tertarik untuk mendalami berbagai program anti-fraud tetapi tidak ingin mengikuti ujian sertifikasi, maka dapat memilih jenis keanggotaan ini. Keanggotaan ini merupakan keanggotaan di ACFE Global
3. Affiliate Member  
Keanggotaan ini hanya merupakan keanggotaan di ACFE Indonesia Chapter.

Anggota ACFE Indonesia saat ini berjumlah 849 orang yang terdiri dari 543 CFE, 283 anggota associate dan 23 anggota afiliasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggota ACFE Indonesia bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, BUMN, perusahaan swasta dan usaha mandiri.

Survei ini disponsori oleh



**EY**

**Building a better  
working world**









### **ACFE Indonesia Chapter**

Menara Taspen (d.h. Gedung ArthaloKa) lantai 7 Suite 706  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Indonesia  
Telp. 62 21 57933222, 62 21 57933295 Fax. 62 21 57933222  
Email: [secretariat@acfe-indonesia.or.id](mailto:secretariat@acfe-indonesia.or.id)  
Website: [www.acfe-indonesia.or.id](http://www.acfe-indonesia.or.id)

### **ACFE Indonesia Chapter East Java Region**

STIE Perbanas Surabaya  
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya, Indonesia  
Telp. 62 31 5947151 Ext. 190  
Bapak Wilopo / Ibu Putri (081245316151)  
Email: [putri@perbanas.ac.id](mailto:putri@perbanas.ac.id)  
[acfejatim@yahoo.co.id](mailto:acfejatim@yahoo.co.id)

### **ACFE Indonesia Chapter Riau Region**

Arif Wahyudi  
081378665877  
Email: [4rifwahyudi@gmail.com](mailto:4rifwahyudi@gmail.com)